



RENJA 2024

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “**Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**” sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan KUA PPAS Tahun 2024.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Juni 2023

KEPALA DINAS



DR. M. ILYAS, ST. M.Sc

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| B. SK Penetapan | |
| A. KATA PENGANTAR..... | <i>i</i> |
| B. DAFTAR ISI..... | <i>ii</i> |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... | 9 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... | 9 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 45 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... | 65 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 77 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 109 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... | 117 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 117 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... | 127 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD..... | 129 |
| 4.1. Program dan Kegiatan..... | 129 |
| BAB V PENUTUP..... | 169 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018-2023 memberikan perkembangan yang cukup pesat dalam pemanfaatan potensi. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah mengalami perubahan cara berpikir dari berorientasi daratan menjadi berorientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan Ekonomi Biru dapat menjadi solusi untuk mengembangkan wilayah yang memiliki potensi laut yang besar di Sulawesi Selatan, namun bukan tanpa tantangan. Untuk memaksimalkan potensi dan mencegah tantangan Ekonomi Biru perlu dilakukan **kerja sama antara semua pihak yang terkait**. Sudah saatnya kita meningkatkan kesadaran kita terhadap potensi laut kita dan berinovasi dalam mengembangkan sektor Ekonomi Biru sehingga tercipta Indonesia yang berkelanjutan. Besarnya potensi sumber daya kelautan pada Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada nelayan, pembudidaya dan unit pengolahan skala menengah dan kecil. Sumberdaya kelautan yang ada belum dapat dimaksimalkan dengan pengolahan perikanan yang baik. Belum adanya keterpaduan pengembangan perikanan karena masing-masing daerah mempunyai program tersendiri sehingga perlu memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan dengan perspektif keruangan. Oleh karena itu pada tahun 2024 tema pembangunan mengarah pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Adanya kebijakan nasional terkait ekonomi biru, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berperan dalam pembangunan pada tahun 2024. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu “Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA).

2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR) dengan tematik Investasi.
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI) dengan tematik Ketahanan Pangan, Penanganan Stunting dan Pengendalian Inflasi.
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI) dengan tematik Penanganan dan Pengurangan Kemiskinan .
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Oleh karena itu pada tahun 2024 perlu menyusun suatu perencanaan yang efektif, efisien, tematik dan inklusif untuk merespon permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini. Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART. Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun secara terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321).
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 33);
41. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan,

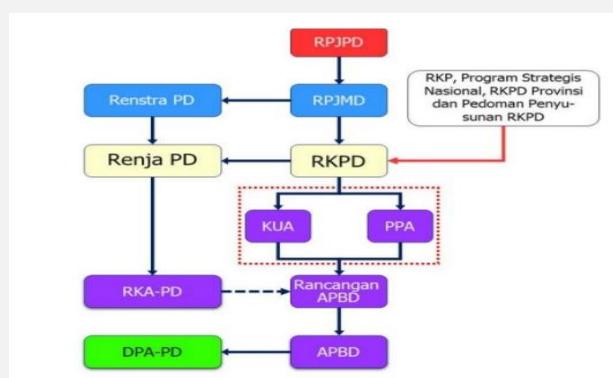
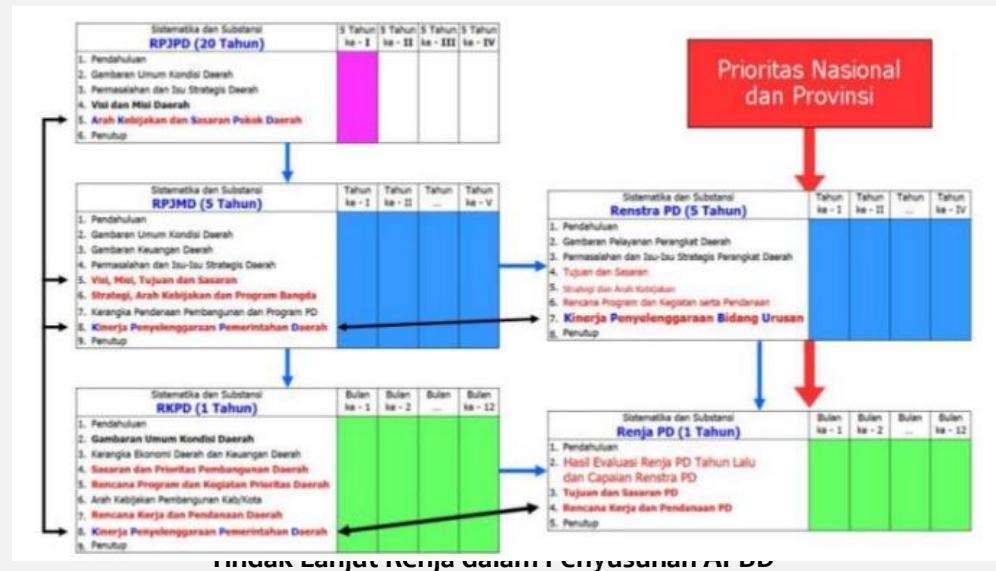
1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dengan memperluas cakupan sesuai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya. (4) sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan tahun 2023, serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah seperti ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahu berjalan meliputi :

- 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 (jika ada). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Menguraikan tentang Rencana Kerja dengan pendanaan yang sesuai

BAB V PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu disajikan pada tabel 2.1 dalam bentuk format Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Provinsi Sulawesi Selatan
(Tabel T-C.29 sesuai lampiran Permendagri 86 tahun 2017)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

| KODE | | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPOIAN PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022) | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2023) | PRAKIRAAN REALISASI CAPOIAN TARGET RENTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN | | |
|------|----|-------------------|---------|--------------|----|--|--|--|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | | TARGET RENJA OPD TAHUN 2022 | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022 | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPOIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) | TINGKAT CAPOIAN REALISASI TARGET RENTRA (%) | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 | |
| 3 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 38.0000 | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL | Produksi garam rakyat Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan | Ton % | 328,634.90 100.0 | 187.151,7 49.49 | 47,500 74.08 | 3,387.8 49.49 | 7.1% 66.81% | 48,450.0 100 | 238.989,5 56,57 | 72.7% 56,57% |
| | | | | | | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | | % | 67.31 | 67.29 | 67.30 | 81.95 | 121.76% | 67.31 | 67.31 | 100% |
| 3 | 25 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.02 | 3.25.02.1.01 | | 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit) | Unit | 63.0 | 24 | 21 | 28 | 133.3% | 21 | 73 | 115.9% |
| | | | | | | Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi | | Ha | 165.0 | 78,47 | 55 | 75,9 | 138.0% | 55 | 209.37 | 126,9% |
| 3 | 25 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.02 | 3.25.02.1.01 | 02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan | Dokumen | 9.0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 100% |
| | | | | | | Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut | Regulasi | | 9.0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 77.78% |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K | Dokumen | | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| | | | | | | Luas kawasan konservasi yang terkelola | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57843,53 | 57843,53 | 100 % |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| 3 | 25 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.02 | 3.25.02.1.01 | 03 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Tambatan Perahu yang terbangun | Unit | 36.0 | 12 | 12 | 3 | 40% | 12 | 27 | 75,0% | |
|------|--------|---------------------------|-----------------|----------------------|----|--|--|--|---|---|--|-----------|---------|---|---|------------|-----------|
| | | | | | | | Jumlah Rehabilitasi ekosistem pesisir | Batang | 1.650.000,0 | 783,360 | 550,000,0 | 759.000 | 138 % | 550,000,0 | 2.092,360 | 126,8% | |
| | | | | | | | Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut | Unit | 21.0 | 8 | 7 | 25 | 385,7% | 7 | 40 | 190,5% | |
| | | | | | | | Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Panatai Berseri | Lokasi | 15,0 | 9 | 5,0 | 7,0 | 140 | 1 | 17 | 113,3% | |
| KODE | | | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2023) | PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN | | |
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 |
| 3 | 2 5 | 0.00.0. 00.38.000 0 | 3.25. 02. | 3.25. 02.1. 03 | | 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan | Kelompok | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 100% | | 1 | 3 | 100% |
| | | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | Unit | 6,0 | 11 | 20 | 14 | 70% | | 20 | 45 | 75% |
| 3 | 2 5 | 0.00.0. 00.38.00 00 | 3.25. .02 | 3.25. 02.1. 03 | 01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir | Unit | 30,0 | 4 | 10 | 7 | 70% | 10 | 21 | 70% | |
| 3 | 2 5 | 0.00.0. 00.38.00 00 | 3.25. 02 | 3.25. 02.1. 03 | 02 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah sarana dan prasarana usaha garam | Unit | 30,0 | 7 | 10 | 7 | 70% | 10 | 24 | 80,0% | |
| 3 | 2 5 | 0.00.0. 00.38.00 00 | 3.25. 02 | 3.25. 02.1. 03 | 04 | Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi | Orang | 540,0 | 180 | 180 | 225 | 125% | 180 | 585 | 108,3% | |
| | | | | | | | | Kelompok | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 100% | | 1,0 | 3,0 | 100% |
| 3 | 2 5 | 0.00.0. 00.38.000 0 | 3. 25.0 3 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | % | 78,95 | 52,36 | 68,42 | 68,42 | 100,00 | 78,95 | 78,95 | 100,00 | |
| | | | | | | | Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap | Rp. M | 44,398,86 | 27,990,04 | 9,029,52 | 11,812,9 | 130,82% | 9,210,12 | 49,013,12 | 110,39% | |
| | | | | | | | Produksi perikanan tangkap | Ton | 2,002,572,90 | 1.205,184,1 | 404,932,2 | 436,735,7 | 107,9% | 413,030,8 | 2.054,950,6 | 102,61% | |
| | | | | | | | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | % | 22,93 | 23,89 | 22,07 | 27,39 | 101,18 | 30,25 | 22,93 | 75,80 | |
| | | | | | | | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 27,17 | 18,11 | 26,79 | 29,43 | 91,02 | 27,17 | 27,17 | 100,00 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|--------|------|--------|-------|-------|------|---|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|----------|-------|
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.01 | | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil | Unit | 581.0 | 3.0 | 282.0 | 588.0 | 208.5 | 285.0 | 876 | 150,8 |
| | | | | | | | | | | | Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah | Kelompok | 73.0 | 3.0 | 28.0 | 86.0 | 307.1 | 28.0 | 117.0 | 160.3 | |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.01 | 01 | Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan | Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil | Laporan | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 100% |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.01 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah kapal yang dibangun | Unit | 41.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 75.0 | 15.0 | 27.0 | 65.9 |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.01 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah sarana usaha perikanan tangkap | Unit | 540,0 | 0.0 | 287,0 | 579,0 | 201.7 | 270,0 | 849,0 | 157.2 |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.02 | | 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Sungai Danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Unit | 304.0 | 47.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 49.0 | 16.11 |
| | | | | | | | | | | | Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah | Kelompok | 370.0 | 47,0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 49.0 | 13.24 | |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.02 | 01 | Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan | Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di wilayah laut Wilayah Sungai Danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Laporan | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 50% |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.02 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah kapal yang dibangun Wilayah Sungai Danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Unit | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 50.0% |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 3 | 3.2 | 5.03. | 1.02 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah sarana usaha perikanan tangkap Wilayah Sungai Danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi | Unit | 300,0 | 48.0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 50,0 | 16.7 |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3. | 25.0 | 4 | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Nilai produksi perikanan budidaya | Rp. M | 74,738,49 | 14,856,34 | 15,198,47 | 21,712,6 | 142.9 | 15,958,39 | 82,191,0 | 109.9 |
| | | | | | | | | | | | Produksi perikanan budidaya | Ton | 19,657,454.7 | 7,375,873.2 | 4,093,705,8 | 4,095,934,7 | 100,1 | 4,298,391.1 | 19,851,679 | 100.9 | |
| | | | | | | | | | | | Persentase ketersediaan benur berkualitas | % | 300.0 | 96,90 | 100.0 | 78,51 | 78,51 | 100 | 275,41 | 91.8 | |
| 3 | 2 | 0.00.0. | 00.38.000 | 3.25.0 | 4 | 3.25.0 | 4.1.0 | 5 | | 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Unit | 397 | 502.0 | 133.0 | 382.0 | 287.2 | 133 | 1.017 | 256.2 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|--------------|----|--|--|--------------|------------|------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | Jumlah produksi benur yang berkualitas | Ekor | 90.0000.0000 | 20.834.500 | 30.000.000 | 17.272.000 | 57.6 | 30.000.0000 | 68.106.500 | 75.7 | |
| | | | | | | Jumlah areal pengelolaan pembudidayaan ikan | Ha | 3.430.0 | 1130.0 | 1150.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.130 | 32.9 | |
| 3 | 2 | 0.00.00.00.38.0000 | 3.25.04 | 3.25.04.1.05 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah sarana prasarana budidaya laut | Unit | 397.0 | 502.0 | 133.0 | 382.0 | 287.2 | 133.0 | 1.017 | 256.2 |
| 3 | 2 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.04 | 3.25.04.1.05 | 04 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih | Ekor | 2,350.0 | 750.0 | 750.0 | 750 | 100 | 750.0 | 2350 | 100,0 |
| 3 | 2 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.04 | 3.25.04.1.05 | 06 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan | Unit | 39.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 100 | 13.0 | 39 | 100 |
| 3 | 2 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.04 | 3.25.04.1.05 | 07 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Laporan | 3,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 3,0 | 100 |
| 3 | 2 | 0.00.0.00.38.0000 | 3.25.04 | 3.25.04.1.06 | 01 | 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di perairan darat | Unit | 1300 | | 150 | | | 150 | | |
| | | | | | | Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota | Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota | Unit | 1000 | 1130 | 2 | 2 | 100 | 11 | 1143 | 114,3 |
| | | | | | | Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota | Jumlah sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota | unit | 300 | 0 | 150 | 150 | 100 | 150 | 300 | 100 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN | |
|------|---|-----------------------|-------------|------------------|--|--|---|---|--|-------|---------|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25 .05 | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku % | 435.34 | 63,78 | 88.73 | 94,01 | 105.9 | 89.85 | 247.6 | 56.9 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25 .05 | 3.25.05. 1.01 | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil | Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Unit | 100.0 | 26 | 33.0 | 26.0 | 75.03 | 36.0 | 26.0 | 26.0 |
| | | | | | | Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan Unit | 27.0 | 9 | 9.0 | 9 | 100 | 9.0 | 27 | 100 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25 .05 | 3.25.05.1.01 | 01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil | Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi Jenis | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 3 | 100 |
| | | | | | | Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP Orang | 360.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | | | | | | Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan Kelompok | 90.0 | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 100 | 30.0 | 105 | 116,67 |
| | | | | | | Jumlah laporan pengawasan terpadu Laporan | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1 | 1.0 | 100.0 | 100 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25 .05 | 3.25. 05.1.01 | 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan Mil | Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Unit | 100.0 | 30.0 | 33.0 | 18.0 | 54.55 | 36.0 | 84.0 | 84,0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | Jumlah peserta sosialisasi dan Orang kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi | 300.0 | 77.0 | 100.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 402 | 134 |
| | | | | | Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan | Unit | 21.0 | 7.0 | 7 | 7 | 7.0 | 21.0 | 100 |

| KODE | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPIAN TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN | | | | |
|------|----|-----------------------|-------------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|---------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | TINGKAT REALISASI (%) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 | | | | | | |
| 3 | 25 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25.0 6 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Ton | 26.833,5 | 6022.7 | 5436.2 | 5487.9 | 100,9 | 5544,1 | 28072.4 | 104,6 | | |
| | | | | | | Persentase Pembinaan mutu produk perikanan % | 100.0 | 60,32 | 80.0 | 76,65 | 95,8 | 100 | 95,8 | 95,8 | | |
| | | | | | | Nilai Hilirisasi Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi Milyar | 1522,52 | 353,57 | 311,06 | 355,05 | 114,14 | 317,28 | 1591,26 | 104,5 | | |
| 3 | 25 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25.0 6 | 3.25.06.1.02 | 3.25.06.1.02 | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing | Unit | 210.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 210.0 | 100 | |
| | | | | | | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Unit usaha | 300.0 | 100,0 | 100.0 | 1000,0 | 100 | 100.0 | 300.0 | 100 | |
| 3 | 25 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25.0 6 | 3.25.06.1.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi | Jenis Produk Inovasi | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 4,0 | 9,0 | 79,0 |
| | | | | | | Jumlah promosi yang diikuti | Kegiatan promosi | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 5,0 | 83,3 | |
| | | | | | | Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan | Orang | 180,0 | 50,0 | 60,0 | 0,0 | 0 | 60,0 | 110,0 | 61,1 | |
| | | | | | | Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha | Unit | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 18,2 | |
| 3 | 25 | 0.00.0.0 0.38.0000 | 3.25.0 6 | 3.25- 06.1.02 | 02 | Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan | Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk | UPI | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 300,0 | 100 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing | Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian Jumlah laporan penerapan prosedur mutu | Hasil uji Mutu Unit Jenis | 300.0 12.0 3.0 | 100.0 1.0 1.0 | 100.0 5.0 1.0 | 100.0 5.0 1.0 | 100 100 100 | 100.0 5.0 1.0 | 300.0 12 3.0 | 100 100 100 |
|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPIAAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPIAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN | | |
|------|---|---------------------|-------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|-----------------------|---|--|--------------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) | TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 | | | | | |
| 3 | 2 | 0.00.00.3 8.0000 | X.X X.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah % Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP % | 100.0 100.0 10.53 | 95.71 99.46 51.1 | 100.0 100.0 9.52 | 99.73 99.47 7.14 | 99.73 99.47 75 | 100 100.0 10.53 | 95.28 100.0 69.2 | 95.28 100.0 657.2 | |
| 3 | 2 | 0.00.00.3 8.0000 | X.X X.01 | X.XX. .01.01 | X.XX.01.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | Doku men | 21.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 100 | 7.0 | 21 | 100.0 |
| 3 | 2 | 0.00.00. 38.0000 | X.X X.01 | X.XX. 01.01 | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Doku men | 45.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100 | 15.0 | 15 | 100.0 |
| 3 | 2 | 0.00.00. 38.0000 | X.X X.01 | X.XX. 01.01 | 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi | Doku men | 144.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 100 | 48.0 | 144 | 100.0 |
| 3 | 2 | 0.00.00. 38.0000 | X.X X.01 | X.XX. 01.01 | 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi | Doku men | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100 | 30.0 | 90 | 100.0 |
| 3 | 2 | 0.00.00. 38.0000 | X.X X.01 | X.XX. 01.01 | 04 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi | Doku men | 90.0 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 90 | 100.0 |
| 3 | 2 | 0.00.00. 38.0000 | X.X X.01 | X.XX. 01.01 | 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi | Doku men | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100 | 30.0 | 90 | 100.0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|---------|----|---|--|----------------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|
| 3 | 2 | 0.00.000. | X.X | X.XX. | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi | Doku men | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100 | 10.0 | 30 | 100.0 |
| | 5 | 38.0000 | X.01 | 01.1.01 | | | Jumlah data dan Informasi | Lapor an Jenis | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100 | 2.0 | 6.0 | 100.00 |
| | | | | | | | Jumlah Data Yang Dipublikasikan | | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 100 | 6.0 | 18.0 | 100.00 |
| 3 | 2 | 0.00.000. | X.X | X.XX. | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Doku men | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100 | 12.0 | 36.0 | 100.00 |
| 5 | | 38.0000 | X.01 | 01.1.01 | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPIAAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPIAAN TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN | | |
|------|----|-----------|----------|---------------|----|---|---|--|---|--|------|------|---|---|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TINGKAT REALISASI (%) | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) | TINGKA T CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTR A (%) | | | | | | | |
| 3 | 25 | 0.00.000. | X.XX .01 | X.XX. 01.1.02 | | X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Adminsitrasii Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | Laporan | 132.0 | 54.0 | 54 | 61.0 | 100 | 54 | 132 | 100 |
| 3 | 25 | 0.00.000. | X.XX .01 | X.XX. 01.1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu | Laporan | 36.0 | 12.0 | 12 | 12.0 | 100 | 12.0 | 36.0 | 100 |
| 3 | 25 | 0.00.000. | X.XX .01 | X.XX. 01.1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan | Laporan | 36.0 | 12.0 | 12 | 12.0 | 100 | 12.0 | 36.0 | 100 |
| 3 | 25 | 0.00.000. | X.XX .01 | X.XX. 01.1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi | Laporan | 3.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 3.0 | 100 |
| 3 | 25 | 0.00.000. | X.XX .01 | X.XX. 01.1.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola | Laporan | 3.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 3.0 | 100 |
| 3 | 25 | 0.00.000. | X.XX .01 | X.XX. 01.1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi | Laporan | 54.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 100 | 18.0 | 54 | 100 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-------------|----------------|----|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--------|
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | | X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah % | 275.0 | 37.50 | 100 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 62.5 | 54,54% |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 01 | Peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai | Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai Unit | 4 | 0 | 2 | 3 | 150 | 1 | 4 | 100 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya | Jumlah pakaian dinas beserta pasang atributnya | 627 | 0 | 209 | 0 | 0 | 385 | 385 | 61,40 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai | Jumlah laporan pendataan administrasi kepegawai yang dikelola Laporan | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100 | 12.0 | 36.0 | 100% |
| KODE | | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPIAAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN | |
| | | | | | | | | | | TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2022 | REALISA SI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2022 | TINGKAT REALISASI (%) | | | |
| 1 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawai | Jumlah laporan data sistem informasi kepegawai yang telah dikordinasi Laporan | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100 | 12.0 | 36.0 | 100% |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 05 | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah laporan monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100 | 12.0 | 36.0 | 100% |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 06 | Pendidikan dan olatihan pegawai berdaran tugas dan fungsi | Jumlah laporan diklat pegawai berdaran tugas dan fungsi yang telah diikut | 9.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0% |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 07 | Sosialisasi peraturan perundang-unadangan | Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-unadangan orang | 9.0 | .0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0% |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.05 | 08 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan orang | 200.0 | .0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0% |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.06 | | X.XX.01.1.06 XXX Administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat daerah % | 280.0 | 60 | 100 | 70 | 70 | 100.0 | 230 | 82,14 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.06 | 01 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi listrik yang tersedia Jenis | 30 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 66,7 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX .01 | X.XX. 01.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia | 90 | 36 | 30 | 30 | 100 | 30 | 96 | 106,7 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|--------------|----------------|----|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|----------|
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.06 | 0 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia | Unit | 30 | 8 | 10 | 24 | 240 | 14 | 46 | 153.3 | |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.06 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | Jenis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.06 | 0 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang tersedia | Jenis cetakan | 30 cetak spanduk 90 cetak buku/laporan | 10 cetak spanduk 30 cetak buku/laporan | 10 cetak spanduk 30 cetak buku/laporan | 100 | 10 cetak spanduk 30 cetak buku/laporan | 10 cetak spanduk 30 cetak buku/laporan | 100% | | |
| | | | | | | | Jumlah penggandaan Dinas Kelautan dan Perikanan yang tersedia | Lembar | 600,000 | 19.780 | 200,000 | 13.334 | 6.67 | 200,000 | 233.114 | 38.85 | |
| KODE | | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | | TARGET KINERJA CAPIALAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN | |
| | | | | | | | | | | TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2022 | REALISA SI RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2022 | TINGKAT REALISASI (%) | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.06 | 0 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | Orang | 450 | 1051 | 150 | 250 | 166.7 | 150 | 1451 | 322.4 | |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.06 | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri | Orang | 30,000 | 266 | 10,000 | 278 | 2.8 | 10,000 | 10,544 | 35.2 | |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang ditatausahaikan | Jenis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola SKPD | Jenis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 3 | 2 | 0.00.0.0 0.38.0000 | X.XX. .01 | X.XX. 01.07 | | X.XX.01.07 XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia (unit) | Unit | 14 | 0 | 2 | 1 | 50% | 12 | 13 | 92.9 | |
| | | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang telah diadakan (unit) | Unit | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 220 | |
| | | | | | | Pengadaan asset tak berwujud | Jumlah asset tak berwujud yang telah diadakan | Unit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|----------|----------|--|---|----------|----------|
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 10 | 50 | 4 | 3 | 75 | 4 | 57 | 98.3 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 36 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 100 |
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET KINERJA CAPIAAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023) | PERKIRAAN REALISASI CAPIAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 6 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 50 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | Orang | 441 | 147 | 147 | 139 | 94.6 | 147 | 433 | 98.2 |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | 175 | 47 | 67 | 36 | 53.7 | 81 | 110 | 62.9 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 48 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 48 | 100 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 24 | 29 | 8 | 11 | 137.5 | 8 | 48 | 200 |
| | | | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Unit | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Unit | 20 | 1 | 2 | 5 | 250 | 3 | 8 | 40 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|------|----|---|----|---|----|---|---|-----|
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 40 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2,5 |
| | | | | | | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 40 | 0 | 20 | 2 | 10 | 0 | 2 | 5 |

Pada tabel 2.1 atau tabel TC-29 dilampirkan data capaian tahun 2021 sesuai dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri no. 050-5889 Tahun 2021. Untuk mengetahui pencapaian realisasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maka pada tahun Anggaran 2022 alokasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 79.288.024.805 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 71.268.260.805 dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.019.764.000 dan anggaran pada Tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 75.547.836.813, Belanja Modal sebesar Rp. 26.238.933.149 total pagu sebesar Rp 101.786.769.962. Berdasarkan alokasi pengunaan anggaran tersebut maka sesuai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan berjalan maka dapat disampaikan hal penting sebagai berikut :

1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .

Kinerja program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2023 adalah :

Level Program :

- a. Program pengelolaan kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Target produksi garam sampai tahun 2023 sebesar 238.989,5 ton dengan melaksanakan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan capaian indikator Produksi Garam selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023 capaian produksi garam sebesar 238.989,5 ton atau sebesar 72,71%.

Produksi garam menghadapi berbagai hambatan dan kendala, meskipun terkadang faktor-faktor ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam produksi garam yang mengalami penurunan:

1. Kondisi Cuaca dan Iklim:

Hujan berlebihan atau musim hujan yang panjang dapat menghambat proses penguapan air laut yang diperlukan untuk memproduksi garam. Sebaliknya, kekeringan yang berkepanjangan juga dapat mempengaruhi produksi garam.

2. Teknologi dan Infrastruktur:

Penggunaan teknologi yang kurang efisien atau infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi kendala dalam meningkatkan produksi garam. Investasi dalam peralatan modern dan fasilitas produksi yang baik dapat membantu mengatasi masalah ini.

3. Regulasi dan Peraturan Lingkungan:

Peraturan lingkungan yang ketat dapat menambah biaya produksi dan menimbulkan hambatan administratif. Produsen garam perlu mematuhi norma-norma kebersihan dan keberlanjutan untuk tetap beroperasi.

4. Pasar dan Persaingan:

Perubahan dalam permintaan pasar atau peningkatan persaingan dari produsen garam lainnya dapat mempengaruhi harga dan profitabilitas. Hal ini dapat menjadi kendala jika pasar garam tidak stabil.

5. Pendidikan dan Pelatihan:

Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam teknik produksi yang efisien dapat menjadi kendala. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi pekerja dapat membantu meningkatkan produktivitas.

6. Ketersediaan Lahan:

Ketersediaan lahan yang memadai untuk pembuatan kolam garam atau fasilitas penguapan dapat menjadi hambatan. Pembatasan lahan oleh pemerintah atau persaingan dengan penggunaan lahan lainnya dapat menghambat produksi garam.

Tindak lanjut perbaikan :

Untuk mengatasi hambatan ini, produsen garam seringkali perlu melakukan inovasi dalam teknologi produksi, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan

bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memecahkan masalah lingkungan dan regulasi.

Target cakupan ketersediaan sarana prasarana mendukung produksi perikanan mencapai 56,57 % dari taret yang ditetapkan tahun 2023 yaitu terealisasi 56 unit dari target 99 unit sampai dengan akhir tahun RPJMD. Kendala yang dihadapi pemenuhan sarana prasarana mendukung produksi perikanan tambatan perahu adalah kesesuaian lokasi yang dipersyaratkan, kesesuaian spesifikasi tambatan perahu, ketersediaan anggaran akibat refocusing anggaran di tahun 2020 dan ketersedian SPD (surat penyediaan dana) tahun 2023 sehingga alokasi tambatan perahu dan sarpras garam tidak terlaksana. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana adalah koordinasi dan verifikasi awal ke lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi dan spesifikasi serta dukungan anggaran untuk pencapaian target.

- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang mencapai 75,80%.

Cakupan Bina Kelompok nelayan mencapai target 75,80 % dan turun 16.28 % dibandingkan tahun 2022. Realisasi kelompok nelayan tahun 2022 sebanyak 86 kelompok turun menjadi 72 kelompok di tahun 2023. Penurunan kelompok yang dibina disebabkan adanya kegiatan pembinaan yang tidak terlaksana karena tidak tersedianya SPD.

- c. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 53,65 % atau mencapai target sebesar 62,72 %.

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencapai target 62,72 % dan turun 40 % dibandingkan tahun 2022. Capaian Kinerja persentase kapatuhan pelaku usaha masih rendah disebabkan pemenuhan dokumen perizinan tidak ada/tidak lengkap/masa berlaku habis karena beralihnya proses

perizinan yaitu melalui OSS, tidak adanya aksesibilitas untuk mengurus perizinan menyebabkan pelaku usaha belum memahami pemenuhan standar/aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku . Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha atas peralihan pengurusan dokumen perizinan maka akan dilakukan kampanye “AYO LENGKAPI” (Tertib Dokumen Kapal Penangkap Ikan) untuk memberikan informasi, sosialisasi pemenuhan dokumen kapal, membantu nelayan mengakses pelayanan melalui Gerai Perizinan yang ada di Pelabuhan Perikanan nelayan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang masih baru dengan melibatkan penyuluhan setenpat untuk pemenuhan standar /aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku.

- d. Program pengelolaan perikanan budidaya dengan indikator Jumlah produksi budidaya mencapai target 96,04 %.

Produksi perikanan budidaya mencapai target 96,04 % dan jika dibandingka dengan target nasional sebesar 4.243.467 ton telah mencapai 97,28 %. Produksi perikanan budidaya tersebut terdiri dari budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar. Perlambatan peningkatan produksi budidaya disebabkan penurunan komoditi budidaya tambak yaitu udang windu dan bandeng dan perlambatan peningkatan rumput laut meningkat 1,62 %. Jika dilihat dari realisasi produksi per kabupaten/kota yang mengalami penurunan adalah Kab. Selayar, jeneponto, makassar, pangkep, Sidrap, enrekang, Soppeng dan Toraja Utara. Informasi diperoleh dari petugas statistik Kabupaten /Kota adalah akibat musim kemarau sehingga produksi budidaya air tawar tidak optimal akibat kurangnya pasokan air, mempengaruhi kualitas air sehingga menyebkan pertumbuhan terhambat bahkan menyebabkan gagal panen, selain itu harga rumput laut yang turun mempengaruhi animo pembudidaya. Produksi rumput laut memberikan kontribusi paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya yaitu berkisar 93 %. Pencapaian volume produksi perikanan budidaya didukung kegiatan bantuan bibit, sarana prasarana budidaya, serta pembinaan dan

pendampingan teknis secara rutin (Tenaga pendamping Budidaya) untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal

- e. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan indikator persentase pengujian mutu produk perikanan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan mencapai target sebesar 97,40 %

Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2023 disebabkan adanya perlambatan kinerja di tahun 2021 karena dampak kondisi pandemi covid. UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan kemanan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan.

- f. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi indikator persentase realisasi kegiatan.

Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah mencapai target 95,28 dan turun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 99,73 %. Hal ini terkendala pada proses administrasi keuangan dimana permasalahan Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak terbit/terlambat terbit menyebabkan realisasai kegiatan tidak mencapai 100 %. Hal yang perlu dilakukan adalah perlunya konsistensi antara anggaran kas dengan penerbitan SPD secara kolektif sesuai permintaan OPD di awal tahun utamanya kegiatan prioritas dan kegiatan fisik sebagai pembuka pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan bisa berlangsung dengan teratur dan sesuai perencanaan

Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

mencapai 75 % disebabkan sarana prasarana garam tidak terlaksana karena kebijakan refocusing dan sarana prasarana tambatan perahu tidak terlaksana karena lokasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk rawa dan Genangan Air Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk rawa dan Genangan Air Lainnya mencapai 16,11%, Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah mencapai 13,24% karena usulan kebutuhan dari masyarakat tidak dilengkapi dengan ketersediaan proposal.
- c. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil mencapai 84% karena ketersediaan proposal kelompok.

Level Sub kegiatan :

- Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir karena adanya refocusing anggaran dan ketersediaan SPD sehingga sarana garam tidak terlaksana
- Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir karena adanya refocusing anggaran dan ketersediaan SPD sehingga prasarana garam tidak terlaksana.
- Penyediaan data dan infromasi sumberdaya ikan dengan indikator jumlah data dan infrmasi SDI mencapai target sebesar
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 50,98%
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah alat bantu tangkap mencapai 26%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%, Jumlah Nelayan yang difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan mencapai 50%.
- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan indikator

kinerja Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan mencapai 33,33%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%,

- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan mencapai 58,97%,
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 41,67%, Jumlah promosi yang diikuti mencapai 33,33%, Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha mencapai 33,33%, Jumlah Fasilitasi dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing mencapai 33,33%.
 - Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian mencapai 25%
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah laporan pengawasan terpadu mencapai 33,33%.
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mencapai 48%
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilai sama)**

Kinerja program /kegiatan yang memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2022 (nilai sama) adalah :

Level Program :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai 66,66%.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 67,69%.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya mencapai 68,10%, Persentase ketersediaan benur berkualitas mencapai 66,67%.
- d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan mencapai 63,36%, Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi mencapai 67,04% , Persentase pengujian mutu produk perikanan mencapai 66,67%

Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator kinerja Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan mencapai 66,67%.
- b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi mencapai 73,33% Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola mencapai 68,97%.
- c. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencapai 66,67%, Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan mencapai 66,67%, Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K mencapai 66,67%.

- d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan mencapai 32,9% karena kegiatan diseminasi udang windu dan pandawa 1000 tidak dilaokasikan karena dilakukan evaluasi untuk hasil pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pelaksanaan berikutnya, Jumlah produksi benur yang berkualitas 75,7 % karena di tahun 2022 tidak mencapai target karena kondisi cuaca dimana kekeringan sehingga permintaan benih berkurang.
- e. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator Jumlah sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebesar karena

Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja : Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan dengan nilai capaian 66,67%, Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K mencapai 66,67%.
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam mencapai 75%, Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi mencapai 66,67%
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 50,98%
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah alat bantu tangkap mencapai 26%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%, Jumlah Nelayan yang difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan mencapai 50%.

- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1 mencapai 71,43%, Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 2 mencapai 66,67%
- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan mencapai 66,67%.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 1 mencapai 66,67%.
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah diseminasi inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (DE SITTO BANGKIT) mencapai 66,67%, Jumlah pengembangan budidaya udang windu 1.000 Ha (WINDU BANGKIT) mencapai 66,67%.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi mencapai 66,67%.
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 41,67%, Jumlah promosi yang diikuti mencapai 33,33%, Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha mencapai 33,33%, Jumlah Fasilitasi dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing mencapai 33,33%.

- Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk (UPI) mencapai 66,67%, Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu (Hasil Uji Mutu) mencapai 67,55%, Jumlah laporan penerapan prosedur mutu mencapai 66,67%.
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi mencapai 66,67%.
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan mencapai 67,33%
- 3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .**

Kinerja program /kegiatan yang melebihi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai dengan tahun 2022 adalah

Level Program :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan.

Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 68,09 % mencapai target sebesar 101,16 % dan naik 0,01 % dibandingkan tahun 2022. Capaian melampaui target karena luas kawasan konservasi daerah telah disesuaikan dengan Perda no 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang awalnya dalam draft RZWP3K (baseline awal

perencanaan) adalah 1.001.953,71 Ha menjadi 849.969,66 Ha sesuai Perda no 3 tahun 2022 dengan jumlah kawasan konservasi sebanyak 13 kawasan. Sampai saat ini jumlah kawasan yang sudah SK Menteri adalah 2 kawasan dan 3 kawasan sedang menunggu penetapan SK menteri.

- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Nilai Produksi Perikanan Tangkap, Produksi perikanan tangkap dan persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional.

Nilai hilirisasi produksi perikanan tangkap mencapai target 144,24 % dan naik 12,46 % dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018-2023 Nilai produksi tangkap terus meningkat dengan peningakatan rata-rata sebesar 13,68 %. Faktor pendorong peningkatan nilai hilirisasi produksi tangkap naik adalah peningkatan produksi khususnya komoditi unggulan Tuna dan Gurita . Nilai produksi Komoditi unggulan perikanan tangkap TCT (Tuna Cakalang Tongkol) naik 2,90 %, dan gurita naik 243,94 %

Produksi perikanan tangkap mencapai 119,16 % dari target dan naik 12,69 % dibandingkan capaian tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata Produksi 7,74 % kurun waktu 2018-2023. perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 448.272 ton dan perairan umum sebesar 43.887,5 ton. Komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Cakalang Tongkol naik 1,81 %, produksi gurita naik 209 % Upaya yang dilakukan untuk mendorong produksi perikanan tangkap adalah bantuan pemerintah kepada nelayan berupa alat tangkap, alat bantu tangkap, mesin, rumpon, dan kapal.

Realisasi persentase pelabuhan perikanan memenuhi standar operasional sebesar 89,47 % meningkat dibandingkan tahun 2022 terealisasi 68,42 %. Persentase pelabuhan perikanan sesuai standar operasional jika memenuhi minimal 3 standar operasional yaitu telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Dari total 19 pebuhan perikanan, yang memenuhi standar operasional sebanyak 17

pelabuhan. Faktor pendorong keberhasilan adalah alokasi anggaran penyediaan sarana prasarana pelabuhan untuk mendukung operasional pelabuhan dan Penetapan SK Kasatpel dan SK syahbandar untuk optimalisasi pelayanan di pelabuhan. Dua pelabuhan tidak memenuhi standar operasional yaitu pelabuhan perikanan Polejiwa Kab. Barru karena kondisi PP Polejiwa sejak dibangun oleh kabupaten tidak operasional karena dibangun di lokasi yang bukan aktifitas nelayan dan PP Tanrusampe Kab. Jeneponto Armada yang beroperasi adalah kapal dibawah 5 GT yang tidak membutuhkan dokumen kesyahbandaran sehingga tidak ada penempatan syahbandar/petugas syahbandar. Terkait 2 pelabuhan tersebut perlu dibuat pertimbangan teknis terkait pengembangan pelabuhan kedepan .

- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan persentase ketersediaan benur berkualitas. Nilai hilirisasi produksi perikanan budidaya mencapai target 113,78 % dan turun 16,37 % dibandingkan tahun 2022 dengan peningkatan rata -rata sebesar 9,14 % kurun waktu 2018-2023. Penurunan nilai produksi rumput laut yaitu sebesar 29,35 % dan nilai produksi bandeng 7,85 %. Nilai produksi rumput laut berkontribusi sekitar 50 % terhadap total nilai produksi budidaya. Tahun 2022 harga rata-rata rumput laut E Cottonii Basah sebesar Rp 4.992 dan Kering Rp 29.953 sedangkan tahun 2023 harga rata-rata rumput laut E Cottonii Basah Rp 3.484 dan Kering Rp 20.900. Sebagai salah satu komoditi ekspor, harga rumput laut sangat dipengaruhi harga permintaan pasar negara tujuan ekspor. Yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan kualitas rumput laut agar mampu bersaing dengan negara produsen rumput laut lainnya. Upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan kepada pembudidaya terkait perlunya memperhatikan kualitas rumput laut mulai dari proses onfarm yaitu menggunakan bibit berkualitas, penanganan pasca panen rumput laut (pengeringan sampai dengan pengemasan).

Ketersediaan benur berkualitas adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan UPT PBAPL dalam rangka pembinaan berupa bantuan benur dan sebagai sumber penerimaan PAD. Tahun 2023 persentase ketersediaan benur berkualitas terealisasi 112,58 %. Capain ini lebih baik dibandingkan tahun 2022 yaitu 78,51%. Tahun 2023 target benur berkualitas sebesar 10.000.000 ekor terealisasi 11.258.000 ekor terdiri dari target bantuan 900.000 ekor (realisasi 900.000 ekor) dan penjualan PAD 9.100.000 (realisasi 10.358.000 ekor). Faktor pendorong untuk menunjang keberhasilan ketersedian benur berkualitas adalah dukungan operasional (pengadaan induk berualitas, pakan dan obat-obatan), jaminan bebas virus melalui hasil uji PCR agar dapat mejamin keberhasilan budidaya dan meningkatkan minat pembeli untuk menggunakan benur dari UPT PBAPL

- d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator Nilai produksi produk olahan hasil perikanan dan jumlah produksi produk olahan hasil perikanan.

Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi mencapai target 158,04 % dan meningkat 41,53 % dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2019-2023 peningkatan rata-rata sebesar 21,57%. Nilai produksi olahan ikan meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi olahan. Selain itu juga dipengaruhi harga bahan baku jika harga bahan baku naik maka nilai produksi juga akan naik.

Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi mencapai target 130,51 % meningkat 22,40 % dibandingkan tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata kurun waktu tahun 2019-2023 sebesar 11,21 %. Produk olahan yang meningkat adalah jenis olahan penggaraman/pengeringan ikan didukung tersedianya bahan baku dan minat pembeli yang tinggi akan produk tersebut.

Level kegiatan :

- a. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi

Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi mencapai 93,33% tahun 2021 tidak tercapai akibat kondisi pandemi sehingga alokasi anggaran berkurang untuk pelabuhan.

- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan mencapai 73,33%

Level Sub kegiatan :

- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut mencapai 152,38%
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam mencapai 75%
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator kinerja Jumlah sarana prasarana budidaya laut dengan nilai capaian 205,38%.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana alat tangkap mencapai 147,67%
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 2 mencapai 83,33%.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator kinerja Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih dengan nilai capaian 427,87%,
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan dengan nilai capaian 138,89%.
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok)

mencapai 83,33%

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil Mil dengan indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi mencapai 331,67%

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Secara umum faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

1. Sebagian besar program mendukung untuk peningkatan produksi namun keberhasilan produksi perikanan dipengaruhi oleh faktor alam seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir (garam).
2. Pelaku usaha belum memperhatikan kualitas produksi dan kontinyuitas produksi agar nilai tambah produk meningkat, memudahkan akses pasar,
3. Kawasan konservasi belum didukung rencana pengelolaan kawasan konservasi agar dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung kelestarian lingkungan sumberdaya perairan dan sebagai implementasi ekonomi biru (blue economy)
4. Kinerja anggaran yang tidak maksimal karena tidak adanya konsistensi antara anggaran kas dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sehingga pekerjaan tidak terlaksana sesuai target perencanaan.
5. Belum optimalnya penerapan sistem kerja yang melibatkan semua jajaran unit kerja dan dukungan stakeholder terkait.
6. Aktivitas masyarakat masih terbatas karena biaya operasional cukup tinggi dan sulitnya akses modal usaha (dampak dari pandemik Covid-19).

7. Perencanaan yang tidak sistematik dan kurang konsistensi terhadap dokumen perencanaan.
8. Kurangnya pemberdayaan tenaga pendamping karena tidak ada biaya insentif;
9. Keterbatasan anggaran , kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya kajian ulang alokasi anggaran terhadap pekerjaan kegiatan tertentu.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Adanya sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan program kegiatan didukung dengan dokumen penunjang dan terarah.
 3. Konsistensi pada jadwal pelaksanaan dan meminilisir terjadinya resiko tidak terpenuhinya target kinerja.
- 5. Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan**

Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target capaian program dan kegiatan yaitu tidak tercapainya target kinerja pada akhir tahun Renstra jika pelaksanaan kinerja Renja tidak memenuhi target sehingga berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta kinerja tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- a. Penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan keberlanjutan perikanan sebagai salah satu upaya adaptasi perubahan iklim dan implementasi ekonomi biru (*blue economy*). Seperti pengembangan garam perlu kegiatan mengkaji penerapan teknologi tunnel/rumah prisma dengan konstruksi “diperbaharui” sebagai percontohan/kawasan di lokasi penghasil garam. Dengan penerapan teknologi tunnel garam dapat membantu petani untuk tetap berproduksi meski sedang hujan pada Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Pembinaan terkait perlunya memperhatikan kualitas produksi selain kuantitas produksi, peningkatan nilai tambah produk, akses pasar, sebagai upaya menjamin kepastian produk terserap pasar dengan nilai produksi yang menguntungkan.
- c. Percepatan rencana pengelolaan kawasan konservasi agar dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung kelestarian lingkungan sumberdaya perairan dan sebagai implementasi ekonomi biru (*blue economy*)
- d. Konsistensi antara anggaran kas dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) secara kolektif utamanya kegiatan prioritas dan kegiatan fisik sebagai pembuka pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan bisa berlangsung dengan teratur dan sesuai perencanaan
- e. Penerapan sistem kerja untuk membangun dan memelihara komitmen bersama bersinergi dan berkolaborasi satu dengan lainnya dalam rangka pencapaian target kerja organisasi baik melalui unit kerja internal maupun eksternal mengingat target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan semua jajaran unit kerja dan dukungan stakeholder terkait.
- f. Perlu kegiatan Koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan penyuluhan untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan
- g. Perlu kegiatan penguatan kelompok dengan penerapan inovasi teknologi penangkapan ikan yang modern dan ramah lingkungan sehingga dapat

meningkatkan produksi dan kualitas hasil tangkapan

- h. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2. (T-C.30) sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUN 2024



Tabel 2.2

(Tabel T-C 30, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | | Tahun (n-2) 2021 | Tahun (n-1) 2022 | Tahun (n) 2023 | Tahun (n+1) 2024 | Tahun (n-2) 2022 | Tahun (n-1) 2023 | Tahun (n) 2024 | Tahun (n+1) 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Produksi Garam Rakyat (ton) | | 48.450 | 46.500 | 47.500 | 48.450 | 5.000 | 3.387,78 | 47.500* | 48.450 | - | |
| 2 | Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%) | | 100 | 50,17 | 74,08 | 100 | 56,89 | 28,28 | 74,08 | 100 | - | |
| 3 | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%) | | 67,31 | 67,29 | 67,30 | 67,31 | 96,08 | 67,29 | 67,30 | 67,31 | - | |
| 4 | Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M) | | 9.210,12 | 8.852,48 | 9.029,52 | 9.210,12 | 11.933,56 | 10.742,8 | 9.029,52 | 9.210,12 | - | |
| 5 | Produksi Perikanan Tangkap (ton) | | 413.030,8 | 396.992,3 | 404.932,2 | 413.030,8 | 442.959,6 | 429.431,2 | 404.932,2 | 413.030,8 | - | |
| 6 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) | | 30,25 | 23,89 | 27,07 | 30,25 | 29 | 18,47 | 27,07 | 30,25 | - | |
| 7 | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%) | | 78,95 | 57,89 | 68,42 | 78,95 | 84,21 | 63,16 | 68,42 | 78,95 | - | |
| 8 | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%) | | 27,17 | 25,61 | 26,79 | 27,17 | 30,62 | 18,11 | 26,79 | 27,17 | - | |
| 9 | Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M) | | 15.958,39 | 14.474,73 | 15.198,47 | 15.958,39 | 21.850,16 | 17.944,4 | 15.198,47 M | 15.958,39 M | - | |
| 10 | Produksi perikanan budidaya (ton) | | 4.298.391,11 | 3.898.767,4 | 4.093.705,8 | 4.298.391,1 | 4.331.299,7 | 4.298.391,1 | 4.093.705,8 | 4.298.391,1 | - | |
| 11 | Persentase ketersediaan benur berkualitas (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 12 | Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%) | | 89,85 | 87,48 | 88,73 | 89,85 | - | 69,18 | 88,73 | 89,85 | - | |
| 13 | Nilai Hilirisasi Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp.M) | | 317,28 | 304,96 | 311,06 | 317,28 | 391,94 | 280,30 | 311,06 M | 317,28 M | - | |
| 14 | Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (Ton) | | 5.544,1 | 5.329,0 | 5.436,2 | 5.544,1 | 6.150,43 | 5.497,4 | 5.436,2 | 5.544,1 | - | |
| 15 | Persentase Pembinaan mutu produk perikanan (%) | | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 100 | - | |

Sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum bahwa Perangkat Daerah yang termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang melaksanakan pelayanan dasar sesuai pasal 3 sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang masuk dalam Urusan Pilihan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Sehingga ditetapkan kinerja pelayanan dan penetapan Kinerja dalam suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi garam yaitu melalui pelayanan peningkatan kualitas dan mutu produk garam berupa :
 - a. Memberikan pelayanan rekomendasi izin usaha garam
- Memberikan pelayanan dalam rangka Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan yaitu pelayanan kebutuhan petambak garam dalam peningkatan produksi dengan mengidentifikasi usulan petambak garam.
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
 - a. Memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Usaha dan dokumen kapal
 - b. Memberikan pelayanan Rekomendasi dalam rangka penerbitan izin usaha Perikanan tangkap dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1.004 unit usaha.
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
 - a. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak , pada triwulan II sudah melakukan pelayanan sebanyak 119 surat rekomendasi
 - b. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 27 surat rekomendasi
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa

- a. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1 unit pengolahan ikan.
- b. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor induk udang vanname dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 4 unit dengan jumlah impor induk udang sebanyak 16.000 pasang induk dan ikan koi/mas/koki 15.000 ekor.
- c. Produksi Benih Ikan Air Tawar

Tahun 2022 sebanyak 5.304.000 Ekor berukuran 1-3 cm dengan perincian ikan mas : 3.902.500 ekor dan ikan nila : 1.401.500 ekor.
- d. Produksi Benur Air Payau

Tahun 2022 sebanyak 15.098.000 ekor jenis windu dengan uraian sebanyak 11.348.000 ekor menjadi sumber PAD dengan penjualan sebesar Rp. 306.396.000,- dan untuk bantuan ke masyarakat sebesar 3.750.000 ekor.
- e. Memberikan pelayanan rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap dan surat keterangan andon.
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan dan peningkatan Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi
 - a. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 5.951 unit (tahun 2021)
 - b. Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 2.151 unit
- Memberikan pelayanan rekomendasi pemanfaatan kawasan konservasi dan perairan dan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan ekosistem laut.

Adanya perubahan kebijakan menyebabkan beberapa program pemerintah mengalami transisi perencanaan sehingga dalam rangka efisiensi anggaran dilakukan refocusing/rasionalisasi belanja pada kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak melaju sesuai dengan agenda karena adanya reformasi pada program pemerintah dimana perangkat daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan perubahan metode penganggaran sehingga

turut mempengaruhi pencapaian kinerja program kegiatan yang masih di bawah target.

Selain itu dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang tidak tepat dan belum terukur secara jelas kinerjanya sehingga diperlukan perbaikan/perubahan rencana kerja dan perubahan rencana strategis.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada bagian ini juga disajikan capaian kinerja IKU pada pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 s/d 2022 (tahun berjalan) sebagaimana tabel berikut ini (terlampir). Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dan Implikasi capaian IKU terhadap Renstra 2018 -2023 maka Evaluasi Capaian Renstra yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu persentase nilai Sakip Perangkat Daerah, persentase capaian kinerja program perangkat daerah dan persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti.

Tabel 2.3
Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE | | REALISASI KINERJA | | CAPAIAN (%) | | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------|--------|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | |
| 1.1 | Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perangkat daerah | Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah | 86,21 | 86,41 | 85,80 | * | 97,39 | * | Data tahun 2023 adalah data proyeksi semester I |
| | | Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah | 98 | 99 | 110,47 | 50 | 112,72 | 50,51 | |
| | | Persentase Nilai temuan Material LHP yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100* | 100 | 100* | |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 106,36 | 106,26 | Predikat sangat baik |

Untuk mencapai sasaran diatas maka terdapat 2 strategi yaitu 1) penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan 2) ketersediaan dukungan operasional kegiatan . Program kegiatan yang dominan terhadap pencapaian sasaran tersebut yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama yang terkait dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan adalah seperti pada tabel 2.3. Berdasarkan data diatas persentase capaian terhadap Rencana Kerja tahun 2021 yaitu persentase Nilai Sakip OPD diharapkan dapat mencapai target, kemudian persentase capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) telah mencapai 108,25 % dan telah mencapai target perencanaan hal ini dipengaruhi oleh beberapa program kegiatan telah melampaui target indikator kinerja. Kemudian % ASN rata-rata memiliki nilai SKP Kategori Baik dimana Integritas dan Komitmen ASN untuk bekerja dan melakukan pelayanan sudah ada peningkatan.

b. Sasaran :

Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan

Sasaran ini didukung oleh Program **Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya** yang merupakan program prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikator kinerjanya fokus ketersediaan bahan baku pada hilirisasi produk. Program ini dikembangkan agar terjadi peningkatan produktivitas produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi baik pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan usaha garam dan pengembangan usaha pengolahan sampai tahun 2023.

Tabel 2.4
Sasaran meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | REALISASI KINERJA | | CAPAIAN (%) | | KETERANGA N |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023* | 2022 | 2023 | |
| 2.1 | Sasaran : Meningkatnya jumlah produksi produktivitas perikanan | Produksi Perikanan (ton) | 4.342.259,8 | 4.546.138 | 4.500.184,6 | 2.415.717,6 | 103,6 | 50,75 | |
| | | Kontribusi PDRB Perikanan (%) | 4,6 | 5,1 | 9,4 | 10,07 | 204,4 | 179,8 | |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 154 | 115,29 | Predikat sangat baik |

Adapun tujuan sasaran adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Peluang pengembangan budidaya dan perikanan tangkap berupa inovasi teknologi yang dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memfasilitasi pelayanan kepada pembudidaya dan nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan hygienisasi sarana prasarana perikanan. Pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep, Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam kapasitas <100 ton, penerapan geomembran.

c. Sasaran :

Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tahun 2022 konsumsi ikan meningkat mencapai 57,46 kg/kap dari tahun 2022 yang telah mencapai 56,3 kg/kap dan di tahun 2021 konsumsi ikan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkat lagi. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2020 telah mencapai 56,39 kg/kap (Data KKP) menargetkan

pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2023 sebesar 59,50 kg/kap dan terealisasi sebesar 68,30 kg/kap . Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

Tabel 2.5
Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | REALISASI KINERJA | | CAPAIAN (%) | | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------|-------------|------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023* | 2022 | 2023 | |
| 2.2 | Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan | Jumlah konsumsi ikan | 59.50 | 62.7 | 68.30 | - | 114.78 | - | Data tahun 2023 belum ada |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 114.78 | | Predikat sangat baik |

Nilai konsumsi ikan diukur diakhir tahun sehingga tidak ada angka proyeksi capaian di triwulan II.

d. Sasaran :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Pada tahun 2022 telah diupayakan perbaikan sarana dan prasarana di daerah-daerah pesisir dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, sehingga kemajuan akses masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir terhadap pembangunan dapat berkembang lebih baik. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi sarana tambatan perahu. Pada tahun 2021 ditargetkan cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mencapai 40% sampai akhir anggaran tahun 2021. Begitu strategis dan tingginya potensi bahari yang dimiliki Sulawesi Selatan, menjadi hal penting bagaimana daerah ini dapat memberdayakan desa pesisir yang

tersebar di beberapa kabupaten/kota sehingga berdampak pada pencapaian Nilai Tukar Nelayan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN pada tahun 2021 telah mencapai 107,43 diharapkan tahun 2023 dapat mencapai peningkatan.

Tabel 2.6
Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | REALISASI KINERJA | | CAPAIAN (%) | | KETERANGAN |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | |
| 2.3 | Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 102.37 | 103.19 | 107.43 | 110.08* | 102.07 | 105.05* | Data Tahun 2023 adalah data sampai bulan Juni |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 102.7 | 105.05 | Predikat sangat baik |

e. Sasaran :

Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, identifikasi kawasan konservasi laut, pembudidayaan *mangrove fisheries*, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum dalam tindak pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator ini didukung dengan Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dimana dilakukan pengawasan untuk penerapan IUU Fishing sehingga diharapkan proporsi tangkapan ikan dapat mencapai batas yang diijinkan agar sumberdaya ikan tidak berkurang. Demikian juga pada kawasan lindung dan perairan juga dilakukan penataan dan rehabilitasi sehingga rasio kawasan lindung dapat terjaga .

Tabel 2.7

Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | REALISASI KINERJA | | CAPAIAN (%) | | KETERANGAN |
|-----|---|--|--------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------|---------|--------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023* | 2022 | 2023* | |
| 3.1 | Sasaran : Meningkatnya kelestaria dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luasperairan territorial (%) | 1.05 | 1.07 | 1.57 | 1.34* | 149.52 | 147.66* | Data Tahun 2023 adalah data proyeksi |
| | | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) | 35.72 | 38.58 | 56.12 | - | 161.64 | - | Tahun 2023 Pengukura data tahunan |
| | | Persentase penurunan Tindakan IUU Fishing (%) | 20.83 | 26.32 | 83.33 | - | 50.01 | - | Tahun 2023 Pengukura data tahunan |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 120.39 | 147.66 | Predikat sangat baik |

Realisasi presentase rata-rata capaian Indikator Kinerja /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah 120,39 (**predikat sangat baik**). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan Lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah maka dengan adanya isu-isu penting maka dapat melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti pada proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan juga penelaahan terhadap isu daerah dan nasional yang mempengaruhi. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika nasional dan regional. Beberapa isu dan dokumen perencanaan lainnya yang ditelaah, meliputi:

a. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Stunting

Perubahan Iklim menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi dalam sistem pangan setelah Pandemi Covid 19 berlalu. Perubahan iklim ini tidak hanya mengganggu rantai pasokan dan membatasi produksi pangan, tetapi juga menunjukkan berbagai aspek yang bisa mengganggu ketahanan pangan dalam jangka panjang, seperti masalah akses pangan akibat tingkat ketergantungan pasar yang tinggi dan berbagai tantangan logistik, serta masalah akses ekonomi di tengah berkurangnya daya beli masyarakat atas pangan akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Isu ini memaksa kita untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan. Pada bulan Desember 2020, Ekonomi Laut Berkelanjutan menyoroti potensi peran laut dalam mengatasi kerawanan pangan dan malnutrisi serta mengubah sistem pangan untuk meningkatkan ketahanan terhadap goncangan dan perubahan iklim.

1. Kontribusi ikan dan pangan laut sebagai sumber protein dan nutrisi lainnya merupakan bagian penting dari pola makan masyarakat Sulawesi Selatan yang menyumbang 50 persen dari seluruh asupan protein hewani dan berperan sebagai sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi lemah. Meskipun ikan menyumbang 50 persen dari total konsumsi protein hewani, data menunjukkan bahwa asupan protein di Indonesia masih termasuk rendah berdasarkan pedoman gizi yang berlaku, terutama dibandingkan dengan konsumsi karbohidrat. Ini menjadi salah satu faktor mengapa negara kita menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang menghadapi dua permasalahan gizi buruk sekaligus, yaitu kurang gizi dan gizi berlebih yang menyebabkan stunting.
2. Untuk mengatasi masalah ini, pangan laut dapat menjadi sumber protein, lemak esensial dan nutrisi yang andal untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Dengan kandungan protein yang tinggi, ikan menjadi pilihan sumber protein yang lebih baik dibandingkan daging, dan menyediakan zat gizi mikro (seperti vitamin A, B, D, dll.) yang diperlukan untuk memerangi tingginya angka stunting dan malnutrisi di negara ini. Selain itu, ikan dapat menjadi sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi rendah yang dapat diakses di pasar atau dipanen langsung di wilayah pesisir atau laut.
3. Kontribusi mata pencaharian berkelanjutan. Sektor perikanan masih menjadi sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat nelayan skala kecil, individu dan tradisional. Sekitar 90 persen nelayan di Sulawesi Selatan adalah nelayan skala kecil dan lebih dari 80 persen tangkapan ikan Sulawesi Selatan berasal dari perikanan skala kecil. Nelayan juga masih menjadi salah satu masyarakat termiskin, di mana 2,7 juta nelayan Indonesia termasuk dalam 25 persen dari total masyarakat miskin nasional dan sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan dari pemerintah yang terbatas bagi nelayan skala kecil dalam agenda perikanan nasional seringkali meninggalkan nelayan skala kecil sehingga mereka tidak dapat

keluar dari kemiskinan. Menyediakan mata pencaharian bagi nelayan dan meningkatkan kemampuan mereka sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan stabilitas ketahanan pangan bagi satu kelompok populasi yang sangat besar di Indonesia. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperhatikan nelayan perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor perikanan.

4. Kontribusi keragaman sumber pangan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan makanan darat. Sulawesi Selatan memiliki potensi untuk mengembangkan pola makan dan mata pencaharian yang lebih beragam melalui panen dan produksi makanan dari laut. Budidaya laut (marikultur) di Sulawesi Selatan adalah yang paling produktif dan memiliki potensi untuk mengambil peran penting dalam ketahanan pangan dan gizi, terutama untuk budidaya laut tanpa pakan (seperti rumput laut dan bivalvia). Produksi rumput laut merupakan bagian terbesar dari total produksi akuakultur di Sulawesi Selatan. Seperti organisme budidaya laut lainnya, rumput laut tidak memerlukan pakan tambahan karena mereka mengekstrak sumber makanan dari lingkungan sekitarnya sehingga biaya operasional yang dibutuhkan lebih rendah. Bivalvia laut (seperti, remis, kerang, tiram) juga merupakan sumber makanan yang berprotein tinggi dan terjangkau. Mereka juga membantu membersihkan saluran air di dalam atau ke laut dengan memakan partikel-partikel organik seperti alga berlebih.

b. Perubahan Iklim

Isu terkait lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka belakangan ini. Dalam proses pembangunan, seringkali kepentingan ekonomi dan ersam dihadapkan dengan kepentingan lingkungan. Permasalahan lingkungan pada dasarnya adalah irisan dari permasalahan yang terjadi pada lingkungan alami (natural environment), lingkungan buatan (man-made environment) terkait aktivitas

perekonomian, dan lingkungan ersam (social environment). Oleh sebab itu, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara bersama sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kondisi ekonomi dan yang dilakukan di Sulawesi Selatan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan di Sulawesi Selatan ditandai dengan terlampaunya daya dukung dan daya lingkungan. Saat ini yang menjadi perhatian degradasi penurunan kualitas air dan penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi kendaraan bermotor, emisi cerobong, dan emisi pembakaran sampah oleh masyarakat. Meningkatnya frekuensi dan risiko bencana di Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan meningkatnya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya luas lahan kritis. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, meningkatnya kerusakan habitat tanaman dan satwa langka, dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, menyebabkan tingginya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Berkaitan dengan isu perubahan iklim yang telah berkembang menjadi isu global dan nasional, tingginya emisi gas rumah kaca diyakini secara ilmiah menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk turut berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menetapkan target sebesar 29% melalui pendanaan dan 41% dengan tambahan pendanaan dari dukungan internasional pada Tahun 2030. Hal ini ditegaskan dengan diratifikasinya Paris Agreement melalui penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Sulawesi Selatan.

c. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Agenda pembangunan dunia Millenium Development Goals (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 telah digantikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Program SDGs aktif mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2030. Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan bersama masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun dari 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan didukung oleh sektor Kelautan dan Perikanan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

d. Transformasi Digital

Digitalisasi terus berkembang pesat di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, di seluruh provinsi di Indonesia, secara rata-rata 44,5% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Sementara itu, di

Sulawesi Selatan sendiri, secara rata-rata 43,91% penduduk merupakan pengguna internet. Lebih jauh, sektor telekomunikasi di Sulsel tumbuh 6,4% pada tahun 2021. Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diharapkan bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui optimalisasi teknologi tepat guna sehingga bisa meningkatkan produktivitas lapangan usaha, penyediaan akses informasi secara cepat dan efektif sehingga bisa menurunkan biaya transaksi, maupun pembukaan akses informasi dan pemasaran sehingga para pelaku usaha, termasuk UMKM, bisa terintegrasi dengan pasar global. Namun demikian, adopsi digital oleh lapangan usaha belum secepat yang diharapkan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah adanya Isu strategis dan permasalahan pada sektor kelautan dan Perikanan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan hukum (law enforcement); dan 3) pelaku usaha perikanan 4) Hilirisasi hasil perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan Hal ini telah diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Sulawesi Selatan

Sebagai contoh untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing), seperti Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami over-exploitation, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin, karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu pula, sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Disisi lain, pada daerah-daerah penangkapan ikan yang tingkat pemanfaatannya belum optimal atau underfishing, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja, bahkan di beberapa perairan, yang memanfaatkannya adalah kapal-kapal perikanan illegal dari negara lain.

Untuk contoh perikanan budidaya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan nasional akan benih dan pakan seringkali tidak mencukupi, sehingga aktivitas

perikanan budidaya, sebagian masih tergantung dengan negara lain yang tentunya akan mengancam keberlanjutan usaha para pembudidaya ikan nasional. Kenyataan seperti tersebut di atas sebagai cerminan bahwa betapa belum kuatnya pengelolaan perikanan nasional, sehingga pemerintah perlu segera menata dan memperbaiki kelemahan yang ada sekarang dengan melakukan penguatan kebijakannya.

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh utama akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah maraknya kegiatan IUU fishing yang jelas-jelas menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Sementara dibidang perikanan budidaya adalah masalah peraturan tata ruang yang sering kali dilanggar atau tidak dipatuhi tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Bahkan tidak sedikit aturan tata ruang diganti atau disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau kelompok penguasa lsu strategis lainnya adalah pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak (economy of scale). Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusianya. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya.

Produk perikanan yang dihasilkan pelaku usaha perikanan dirasa masih sulit menembus pasar karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi masih belum stabil. Volume produksi masih dapat dioptimalkan dengan meningkatkan

pengetahuan dan kapabilitas di bidang manajemen, akses terhadap informasi pasar, akses permodalan, teknologi dan sumberdaya manusia (SDM).

e. Permasalahan Internal Organisasi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Adanya perubahan iklim sehingga aktivitas pembudidaya dan nelayan terhambat pada kebutuhan sarana operasional ;
2. Pelayanan tidak dapat maksimal karena dampak pandemik;
3. Pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang diharapkan karena adaptasi terhadap aturan dan kebijakan baru ;
4. Terdapat beberapa target indikator yang berpotensi tidak tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kelautan dan perikanan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

1. Bergesernya proses pengadaan barang dan jasa, tender/lelang sehingga pelaksanaan kegiatan tidak selesai tepat waktu;
2. Kebutuhan Bahan Bakar untuk operasional kegiatan baik darat maupun di laut terbatas karena anggaran tidak tersedia akibat refocusing anggaran;
3. Pendampingan dan pembinaan pada masyarakat terbatas karena tidak tersedianya anggaran;
4. Unit kerja masih belum memahami pencapaian indikator kinerja sehingga masih terdapat target indikator yang belum tercapai;
5. Unit kerja belum memahami target indikator yang berdampak hasil (outcomes) sehingga penerapan kebijakan pemerintah yaitu Quick Wins

(perubahan yang terjadi pada masyarakat) belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: - Kurangnya kegiatan yang sifatnya padat karya, penguatan iklim investasi dalam menghadapi pasar baik local maupun global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable DevelopmentGoals)

Selain itu Adapun dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable DevelopmentGoals) maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2004 mempedomani NSPK dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan belum termasuk Perangkat Daerah yang memiliki SPM namun dalam penyelenggaraan pelayanan tetap melaksanakan kinerja pelayanan dan mendukung tujuan pembangunan SDGs. Adapun pencapaian program internasional yang didukung oleh sektor kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Evaluasi Pencapaian SDGs Sektor Kelautan

| Kode Indikator | Tujuan / Indikator | Target Nasional | Target Provinsi | Target TPB/SDGs | | | | | | Capaian TPB/SDGs | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|------|-------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (Proyeksi) | 2023 (Proyeksi) | |
| 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha | 87% | 87% | - | 82,4 | 86,88 | 87,48 | 88,73 | 89,85 | 54,8 | 50,13 | 66,4 | 69,18 | 88,70 | 99,87 | Dinas kelautan dan perikanan |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------------------------|
| 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil | 2 regulasi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | Dinas kelautan dan perikanan | |
| 14.b.1.(a) Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan | 19 kab/kota | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Dinas kelautan dan perikanan | |
| 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang) | 500.000 | 197.253 | | | | | | 39.451 | 78.902 | 23.814 | 37.811 | 11.587 | 11.827 | 12.027 | 12.250 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

C.

Pencapaian target indikator SDGs yaitu :

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2022 sebesar 69.18 % masih belum mencapai target sebesar 87.48 namun diupayakan pada tahun 2023 telah mencapai target akhir Renstra.
2. Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil pada tahun 2022 ditetapkan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan tanggal 9 Juni 2020;
3. Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 19 kabupaten/kota memiliki hak akses dalam permodalan dan pendanaan untuk pengembangan usaha seperti KUR dan Jaminan dalam berusaha melalui pelayanan kartu KUSUKA;
4. Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang) yaitu nelayan mendapatkan jaminan asuransi dalam melakukan usahanya dimana pada tahun 2022 sebanyak 11.827 orang dan pada diupayakan tahun 2023 dapat mencapai target

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

a. Peluang

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah situasi pertumbuhan ekonomi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara pusat dengan kabupaten/kota dan mitra usaha, sehingga secara harmonisasi dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Tantangan

- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Kurangnya literasi baik pemerintah maupun masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Adanya peluang dan tantangan tersebut maka dapat diformulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan maka dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 2.9

Pemetaan Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

| Isu Strategis Nasional | Permasalahan | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|--|
| Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Stunting | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan 3. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi 4. Tingginya angka stunting | Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi local | <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan hasil produksi perikanan ● Peningkatan bantuan sarana dan prasarana ● Pengembangan sektor unggulan sesuai dengan permintaan pasar |
| Perubahan Iklim | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA | Pengembangan sektor Kelautan dan perikanan yang mandiri, inovatif, berdayasaing dan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang inovatif akan teknologi ● Pengembangan potensi perikanan dan kelautan berbasis wilayah dan berkelanjutan ● Peningkatan usaha alternatif minat masyarakat pesisir ● Penerapan pola Kemitraan usaha perikanan ● Peningkatan manajemen dan kinerja pelaku Usaha perikanan (Aparatur Sipil Daerah dan Masyarakat pelaku usaha perikanan) |
| SDGs | Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal | Pengembangan sumberdaya kelautan merujuk kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kelembagaan masyarakat usaha perikanan ● Pengembangan potensi pelabuhan perikanan ● Pengembangan potensi industri maritim ● Restrukturisasi armada perikanan tangkap ● Pengembangan informasi dan jaringan pasar |

| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| Transformasi Digital | Masih rendahnya keterampilan Angkatan Kerja | Pengembangan inovasi sarana dan prasarana usaha perikanan berbasis masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir dan pengarustamaan gender (PUG) ● Penerapan inovasi sarana prasarana usaha perikanan ● Penerapan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam pengembangan usaha perikanan |
| Internal Organisasi | Rendahnya capaian realisasi program kegiatan | Penataan dan penerapan manajemen organisasi | <ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan metode Sistem Kerja ● Penyusunan Proses Bisnis ● Melakukan analisis <i>Critical Succes Factor (CSF)</i> |

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan pembangunan lima tahun keempat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan dan mengatasi efek pertumbuhan pada tahapan sebelumnya yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi antar lapisan dan antar wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2024 maka berdasarkan RPD 2024-2026 dan arahan kebijakan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yaitu :

Tabel 2.11

**Misi dan Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2024 dengan mengacu RPJPD
Sulawesi Selatan (periode kelima 2005-2025)**

| Misi ke | | Kebijakan Prioritas (2005-2025) | Kebijakan Pj. Gubernur tahun 2024 |
|----------------|---|---|--|
| 4 | Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan social ekonomi yang berkeadilan | 1. Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi; 2. Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan | Tematik Penanganan Kemiskinan |
| | | 3. Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan | Tematik Ketahanan Pangan dan Penanganan stunting |
| | | 4. Hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis; | Tematik Pengendalian Inflasi |
| | | 5. Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir; | Tematik Ketahanan Pangan |
| 5 | Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional | 1. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosialekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan; | Tematik Ketahanan Pangan |

Alasan penjelasan proses dilaksanakan di tahun 2024, dimana seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD 2018-2023 guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Oleh karena itu Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Untuk **tahun 2024 fokus pada ketahanan pangan , penanganan kemiskinan, penanganan stunting dan pengendalian inflasi.** Arahannya pada pertumbuhan dan **pemerataan** pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan** diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan, yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan dukungan investasi; **Optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.
- b. Bentuk amanah yang tertuang dalam Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 untuk sektor Perikanan terdapat **program Prioritas :**
 1. Tematik Penanganan Kemiskinan
 - Pengembangan Rumah Ikan dan Terumbu Buatan
 - Pengembangan Kolam Terpal Budidaya Ikan Air Tawar
 - Pengembangan komoditas unggulan Rumput Laut dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomis
 2. Tematik Penurunan Stunting

- Dukungan peningkatan kompetensi dan pengujian mutu produk hasil perikanan, dan sertifikasi produk untuk mendukung eksport hasil perikanan Sulsel
- Pameran dan Promosi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Nasional/Daerah

3. Tematik Pengendalian Inflasi

- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

4. Tematik Ketahanan Pangan

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Penjaminan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Tersedia dan beroperasinya kendaraan berpendingin Untuk Mendukung Kualitas dan daya saing produk perikanan)
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

5. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Agar Rencana program kegiatan labih terarah dan konsisten terhadap dokumen RPJMD dan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka review rancangan awal disajikan dalam bentuk tabel 2.9 atau Tabel C-31 sesuai lampiran permendagri 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan :

- Indikator pada program kegiatan agar lebih tajam dan tepat sasaran terutama pada program teknis.
- Penetapan pagu per legiatan harus memperhatikan target indikator jika pagu berkurang maka dilakukan penyesuaian target indikator, perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
- Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan

Oleh karena itu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda dan Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

Tabel 2.11

(Tabel T-C 31, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan**Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan****Lembar 1 dari**

| Kode | | | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL AWAL KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting | | | |
|------|---|---|---|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|----------------|--------------------------|--|
| | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp.000) | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | |
| 3 | 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | |
| 3 | 2 | 5 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah | 99,55 % 95 % 100 % | 35.107.999,713 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah | 100 % 60 % 100 % | 39.905.897,461 | Jumlah Pegawai bertambah | |
| 3 | 2 | 5 | 011 .0 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 9 Dokumen | 1.026.268,500 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | 9 Dokumen | 2.140.582,970 | | |
| 3 | 2 | 5 | 01 | 1. 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 234.860.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 1.279.888,270 | |
| 3 | 2 | 5 | 01 | 1. 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 12.00.500 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 48 Dokumen | 24.028,300 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|---|--|--|------------|----------------|---|--|--|------------|----------------|--|
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 16.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 28.708.600 | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 15.708.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 17.918.000 | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 30.100.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 28.673.500 | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan | 292.100.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan | 16.214.300 | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 425.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 17.918.000 | |
| 3 | 2 5 | 011 .0 | 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Adminsitrasii Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 45 Laporan | 24.111.487.851 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Adminsitrasii Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu | 45 Laporan | 24.758.746.896 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--|--|--|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|
| 3 | 2 | 01 | 1. | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 189 Orang/ Bulan | 24.006.787.851 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 209 Orang/ Bulan | 24,608.721.896 | |
| 3 | 2 | 01 | 1. | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | 0 | |
| 3 | 2 | 01 | 1. | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 5.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 16.407.200 | |
| 3 | 2 | 01 | 1. | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 2.700.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 3.529.800 | |
| 3 | 2 | 01 | 1. | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 6.405.000 | |
| 3 | 2 | 01 | 1. | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 27.000.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 35.770.000 | |
| 3 | 2 | 01 | 1. | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 18 Laporan | 64.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 87.913.000 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|---|--|--|------------|------------|---|--|--|-----------|------------|
| | | | | | Bulanan/Triwulan/Seme SKPD | | | | | | | | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 0 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | 0 |
| 3 | 2 5 | 011 .0 | 3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 53 Laporan | 49.600.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 1 Laporan | 63.810.700 |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2.690.700 |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 54.660.000 |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 0 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 6.460.000 |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|--|--|--|------------|--------|--|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 03 | 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 011 .0 | 4 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah | Laporan 2 | 0 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah | 1 Laporan | 30.040.000 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 04 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 0 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 30.040.000 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 04 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 0 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 0 Dokumen | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 011 .0 | 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah | 100 persen | 23,288 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah | 100 persen | 484.248.200 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----------|----|---|--|---|------------|--------|---|--|---|------------|-------------|--|--|
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | 0 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | 23.780.000 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 209 Paket | 39,000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 209 Paket | 333.610.000 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 79,041 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 5.246.000 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 20,297 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 6.202.400 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 34,950 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 57.090.700 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 50,000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 120 Orang | 58.319.100 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|--|--|--|------------|---------|--|--|--|-------------------|-------------|----------------------|--|
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 0 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 011 .0 | 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah | sen 100 | 344,770 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah | 100 persen | | 1.907.494.830 | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 25,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 30.647.600 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 62,020 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 826.939.030 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 25,000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 93.555.000 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30 Paket | 32,750 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30 Paket | 104.102.900 | | |
| 3 | 2 5 | 01 | 1. 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 50,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 150.735.500 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|----|--|--|---|------------|--------|--|--|---|------------|-------------|--|--|
| 3 | 2 | 01 | 1. 0 6 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 698.245.800 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 0 6 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 50,000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 3.269.000 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 0 6 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 0 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 0 | | |
| 3 | 2 | 011 .0 | 7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Unit | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Unit | 153.102.360 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 07 | 05 | Pengadaan Mebel | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 0 | Pengadaan Mebel | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 53.102.360 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 07 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 0 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 100,000,000 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|----|--|--|--|------------|-----------|--|--|--|------------|---------------|--|--|
| 3 | 2 | 01 | 1. 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 | | |
| 3 | 2 | 011 .0 | 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis | 250,000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | 4,717,482,391 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 0 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1,323,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2,459,372,135 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 50,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 0 | | |
| 3 | 2 | 01 | 1. 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,764,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3,710,395,644 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|----|--|--|--|-----------|---|--|--|--|---------|---------------|--|
| 3 | 2 | 011 | 0.0 | 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Unit | 5,363,750 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 30 Unit | 3.290.346.331 | | | |
| 3 | 2 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 16 Unit | 28,113,75 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 17 Unit | 1.977.276.531 | |
| 3 | 2 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 55,125 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 Unit | 133.169.800 | |
| 3 | 2 | 01 | 1.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 55,125 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 50,000,000 | |
| 3 | 2 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 1.129.900.000 | |
| 3 | 2 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------------|----|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 3 | 2 | 01 | 1. 0 9 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 |
| 3 | 2 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah produksi garam rakyat | 100% 67,31% 48.450Ton | 12,259,495,4 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah produksi garam rakyat | 100% 67,31% 48.450Ton | 11,969,196,200 |
| 3 | 2 | 02 | 1.0 | 1 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi | 55 Ha 21 Unit | 10,772695,4 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi | 56,45 Ha 21 Unit | 11.642.290.100 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|----|---|--|---|---------------|------------|---|--|---|---------------|----------------|
| 3 | 2 | 02 | 1. 01 | 02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | 1038850,36 Ha | 551,250 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | 1038850,36 Ha | 692.365.000 |
| 3 | 2 | 02 | 1. 01 | 03 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi | 56.45 Ha | 12,789,000 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi | 56.45 Ha | 10.028.792.100 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|----|---|---|---|---------------|--|---|--|---|---------------|-----------|
| 3 | 2 | 02 | 1.0 | 2 | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi | Rekomendasi | 53,550,000 | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi | Dokumen Rekomendasi | 1,830,000 | | |
| 3 | 2 | 02 | 1.02 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Rekomendasi | 10.500 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 | 02 | 1.02 | 02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 4 Rekomendasi | 12,600 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 4 Rekomendasi | 1,830,000 |
| 3 | 2 | 02 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan | 4 Rekomendasi | 12,600 | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 | 02 | 1.02 | 04 | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan | 4 Rekomendasi | 12,600 | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|--|---|--|-----------|-----------|--|---|--|-----------|-------------|--|--|
| 3 | 2 | 02 | 1. | 05 | Pencatatan dan Pengadministrasi an Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | 1 Dokumen | 5,250 | Pencatatan dan Pengadministrasi an Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | 0 Dokumen | 0 | | |
| 3 | 2 | 02 | 1.0 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan | Unit | 3,250,000 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan | 24 Unit | 919.303.000 | | |
| 3 | 2 | 02 | 1. | 03 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 100 Orang | 75,000 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 100 Orang | 218.610.000 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|----|---|--|--|-------------|--------|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 3 | 2 | 02 | 1. 03 | 02 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 10 Kelompok | 0 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 10 Kelompok | 673.050.000 | |
| 3 | 2 | 02 | 1. 03 | 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 20 Kelompok | 75,000 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 20 Kelompok | 27,643,000 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|-----------|---|
| 3 | 2 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Cakupan bina kelompok nelayanJumlah produksi perikanan tangkapNilai Hilirisasi Produksi Perikanan TangkapPersentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasionalPersentase Produksi perikanan kelompok nelayan | %TonRp. Miliar%% | 29,984,973,229 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah produksi perikanan tangkap Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan | 67,31% 413.030,8 Ton Rp. 9.210,12 M 78,95% 27,17% | 36.133.269.400 | | | |
| 3 | 2 | 03 | 1.0 | 1 | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil | Unit | 102,000,000 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil | 287 Unit | 15,523,425,000 | | | |
| 3 | 2 | 03 | 1. | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah data dan informasi sumber daya ikan yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil | 0 Dokumen | 0 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah data dan informasi sumber daya ikan yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil | 0 Dokumen | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|----|---|---|--|--|------------|--|--|--|---------|---------------|--|
| 3 | 2 | 03 | 1. 01 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 14,847,000 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Kepulauan | Jumlah Prasara Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 17 unit | 7.411.690.000 | |
|---|---|----|----------|----|---|---|--|--|------------|--|--|--|---------|---------------|--|

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Palopo, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Palopo, Semua KelurahanKab . Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------------------------|---|---|-----------|---|---|----------|---------------|
| 3 | 25 | 03 | 1 . 0 1 0 3 | Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap | Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, | 3,150,000 | Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap | Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, | 510 unit | 4.638.953.000 |
|---|----|----|----------------------------|---|---|-----------|---|---|----------|---------------|

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Palopo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. . Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Palopo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|----|--|---|--|-----------|---|---|--|--|-------------|---|
| 3 | 2 5 | 03 1.0 | 2 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan | Unit | 0 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan | 15 Unit | 207.004.500 | |
| 3 | 2 5 | 03 1. 02 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 0 Dokumen | 0 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 0 Dokumen | 0 |
| 3 | 2 5 | 03 1. 02 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 0 Unit | 0 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 0 Unit | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----------|----|---|---|---|--------------|--------|---|--|---|-----------------|-------------|--|
| 3 | 2 | 03 | 1. 02 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 0 Unit | 0 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Enrekang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Soppeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 15 Unit | 207.004.500 | |
| 3 | 2 | 03 | 1. 0.0 | 3 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Rekomendas i | 52,500 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 100 Rekomendasi | 18.389.800 | |
| 3 | 2 | 03 | 1. 03 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi | 0 Dokumen | 0 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi | 0 Dokumen | 0 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--------------|----|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|--|--|
| | | | | | sampai dengan 30 GT | | Kewenangan Provinsi | | | Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | Kewenangan Provinsi | | | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 03 | 02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | 0 Rekomendas | 0 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | 100 Rekomendasi | 18.389.000 | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 03 | 03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 0 Dokumen | 0 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 0 Dokumen | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 03 1.0 | 1. 0 | 4 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | | Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan | rekomendasi | 57.750.000 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | | Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan | 0 rekommendasi | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 0 4 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Dokumen | 0 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Dokumen | 0 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | Dimiliki oleh Nelayan Kecil | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|--|--|--|-----------------------------|---------|--|--|--|---------------|---|
| 3 | 2 5 | 03 04 | 1. 04 | 02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | 150 Rekomendas | 50,000 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 03 1.0 | 5 | | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan | Laporan 12 | 625,000 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan | 0 Laporan | 0 |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 05 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Dokumen | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|---|--|--|----------------|--------------|---|--|--|-----------------------|----------------|------------|--|
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 05 | 02 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan | 125 Dokumen | 75,000 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan | 0 Dokumen | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 03 1.0 | 6 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola | Unit | 10,792,398,2 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola | 5 Unit | 23.857.232.100 | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 06 | 01 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | unit | 109,623,2 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | 5 Lokasi | | 51.000.000 | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 06 | 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 5 Unit | 9,900,000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 5 Pelabuhan Perikanan | 23.634.011.500 | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 06 | 03 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | 2 Layanan | 75,000 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | 2 Layanan | 172.220.600 | | |
| 3 | 2 5 | 03 1.0 | 7 | | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT | rekomed asi | 26,250, | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT | 0 rekommendasi | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 07 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan | 1 Dokumen | 5,250 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan | 0 Dokumen | 0 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|---|---|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|---|
| | | | | Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kelurahan | Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kelurahan | Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1. 07 | 02 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan | 2 Rekomendas i | 5,000 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 03 1.0 | 8 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut dgn Ukuran Sampai dgn di Laut,Sungai,Danau ,Waduk dan Genangan air lainnya dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi | | 2 Rekomendas i | 5,000 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Ko ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut dgn Ukuran Sampai dgn di Laut,Sungai,Danau ,Waduk dan Genangan air lainnya dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi | 0 Rekomendasi | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------------|----|--|--|--|----------------|--------|--|--|--|---------------|-------|--|
| 3 | 2 | 03 | 1. 0 8 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 5,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Dokumen | 0 | |
| 3 | 2 | 03 | 1. 0 8 | 02 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Rekomendas i | 0 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Rekomendasi | 0 | |
| 3 | 2 | 03 | 1.0 | 9 | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT | 10 laporan | 50,000 | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT | 0 Laporan | 0 | |
| 3 | 2 | 03 | 1. 0 9 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 0 Dokumen | 0 | |
| 3 | 2 | 03 | 1. 0 9 | 02 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | 0 Rekomendas i | 0 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 | |
| 3 | 2 | 03 | 1.1 | 0 | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan | | Jumlah laporan pendaftar Perikanan Berukuran Sam | 0 Laporan | 0,000 | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran | | Jumlah laporan pendaftar Perikanan Berukuran Sam | | 0,000 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----------|----|---|--|---|-----------------------|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Dengan 10 GT yang Berop Laut,Sungai,danau, waduk, Genangan air Lainnya Dap diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi | | | sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Dengan 10 GT yang Berop Laut,Sungai,danau, waduk, Genangan air Lainnya Dap diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi | | 0 Laporan | | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1.1 0 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi | | 0 Dokumen | 0 | |
| 3 | 2 5 | 03 | 1.1 0 | 02 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | | 0 Rekomendasi | 0 | |
| 3 | 2 5 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas | Ton Rp. Milyar Persen | 15,894,535 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas | | 4.298.391,1 Ton Rp. 15.958,39 M 100% | 7.124.746.500 | |
| 3 | 2 5 | 04 | 1.0 | 1 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota | rekomendasi | 63,000 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal | | 0 rekommendasi | 0 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | dal (satu) daerah Provinsi | | | ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | (satu) daerah Provinsi | | | |
|---|--------|-----------|----------|--------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|---------------|---|
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 01 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 1 Rekomendas i | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 01 | 02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 5 Rekomendas i | 50,000 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 01 | 03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | 0 Dokumen | 0 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | 0 Dokumen | 0 |
| 3 | 2 5 | 04 1.0 | 2 | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing | 10 rekomen dasi | 15,750 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing | 0 rekomendasi | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|--|--|--|---------------|-----------|--|--|--|---------------|---|--|
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 02 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 1 Rekomendasi | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 | |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 02 | 02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 0 Rekomendas | 0 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 0 Rekomendas | 0 | |
| 3 | 2 5 | 04 1.0 | 1.0 | 3 | Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan | 5 rekomendasi | 7,350,000 | Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan | 0 rekomendasi | 0 | |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 03 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 1 Rekomendas | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--------------|----|---|--|---|---------------|------------|---|--|---|---------------|---------------|
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 03 | 02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 | Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 041 .0 | 4 | | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi | 10 Laporan | 750,000 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi | 0 Laporan | 0 |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 0 4 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Rekomendasi | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 0 4 | 02 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Rekomendas | 0 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Rekomendas | 0 |
| 3 | 2 5 | 04 1.0 | 5 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Unit | 33,412,500 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | 133 Unit | 7.124.746.500 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----------|----|---|---|--|------------|-------------|---|---|---|------------|---------------|--|--|
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 05 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 05 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 130 Unit | 3,585,087,5 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 130 Unit | 3.095.477.000 | | |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 05 | 04 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 1 Unit | 226,012,5 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 1 Unit | 50.006.000 | | |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 05 | 06 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat | 13 Dokumen | 50,000 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat | 13 Dokumen | 47.840.000 | | |
| 3 | 2 5 | 04 | 1. 05 | 07 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi (laporan) | 1 Laporan | 62,500 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pembudidaya | 30 Orang | 49.800.000 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|----|--|--|--|--|---------|-------------|--|--|--|----------|---------------|--|
| 3 | 2 5 | 04 1.0 | 6 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar | Unit | 959,272,500 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar | 150 Unit | 4.029.269.500 | |
| 3 | 2 5 | 04 1. 0 6 | 01 | | Penyediaan Prasrama Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Prasrama Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 18 Unit | 72,500 | Penyediaan Prasrama Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Prasrama Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 18 Unit | 3.371.965.000 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|----------|-------------|--|
| 3 | 2 | 04 | 1. | 02 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1150 unit | 10,000,000 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 150 unit | 657.304.500 | |
|---|---|----|----|----|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|----------|-------------|--|

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|----|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|---------------|--|
| 3 | 2 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku | 89,85% | 11,592,522,6 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku | 89,85 % | 4.306.335.000 | |
| 3 | 2 | 05 | 1.0 | 1 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Unit usaha | 11,371,422,6 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | 9 Unit usaha | 4.268.230.000 | |
| 3 | 2 | 05 | 1.01 | 01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi (jenis), Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP (orang), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) Jumlah laporan pengawasan terpadu (laporan) | 1 jenis, 120 org, 30 kelompok, 1 laporan | 109,351,13 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi (jenis), Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP (orang), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) Jumlah laporan pengawasan terpadu (laporan) | 1 Dokumen | 77.555.100 | |
| 3 | 2 | 05 | 1.01 | 02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan (unit), Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (unit), Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap | 7 unit, 36 unit, 100 org | 11,141,471,48 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan (unit), Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (unit), Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap | 7 Dokumen | 3,363,856,900 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|----|---|--|---|-------------|--------|---|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | peraturan dan regulasi [orang] | | | | peraturan dan regulasi [orang] | | | | |
| 3 | 2 5 | 05 | 1. 01 | 03 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil yang mendapatkan pengawasan (unit) | 1 unit | 50,250 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil yang mendapatkan pengawasan (unit) | 1 Dokumen | 17.830.000 |
| 3 | 2 5 | 05 | 1. 01 | 04 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) | 14 Kelompok | 70,350 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) | 30 Kelompok | 218.840.000 |
| 3 | 2 5 | 05 1.0 | 2 | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | Unit | 0 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | 2 Unit | 38.105.000 |
| 3 | 2 5 | 05 | 1. 02 | 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 50,000 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | 10,060,000 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | Sesuai dengan Kewenangannya | | Sesuai dengan Kewenangannya | | | (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | | | | | | | |
|---|--------|----|----------|-----------------------------|---|--|--|------------------|--|---|--|--|-------------------------------|---------------|--|--|
| 3 | 2 5 | 05 | 1. 02 | 02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | 50,000 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | 10.860.000 | | |
| 3 | 2 5 | 05 | 1. 02 | 03 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 0 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 17.185.000 | | |
| 3 | 2 5 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi | Rp. Miliar % Ton | 923 2,520,602, | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi | Rp. 317,28 M 100 % 5.544.1Ton | 1.492.535.500 | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|----|---|---|--|----------------------|--|---|--|--|---------------|---|
| 3 | 2 5 | 06 1.0 | 1 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan | rekomen dasi | 66,675,000 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan | 0 rekomen dasi | 0 | | |
| 3 | 2 5 | 06 1. 01 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi | 1 Rekomendas i | 50,000 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 06 1. 01 | 02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Rekomendas i | 25,000 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Rekomendasi | 0 |
| 3 | 2 5 | 06 1. 01 | 03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 0 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Dokumen | 0 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | | | Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | | | |
|---|---|----|------|------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|---------------|
| 3 | 2 | 06 | 1.0 | 2 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Unit usaha | 2,390,927,9 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Unit usaha | 1.491.784.100 |
| 3 | 2 | 06 | 1.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 342,326 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | | 491.784.100 |
| 3 | 2 | 06 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, | 2,048,601,92 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, | | 1.000.000.000 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | | dan Berdaya Saing | | Digunakan, dan Berdaya Saing | | | | |
|---|--------|----------------|----|--|--|--|---|---|---|---|---|-----------|---------|--|
| 3 | 2 5 | 06 1.0 | 3 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan | poran 2 0 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan | 2 Laporan | 751.400 | | | |
| 3 | 2 5 | 06 1. 03 | 01 | | Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distr ibusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distrib usi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen 0 | Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Di stribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distr ibusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 351.400 | |
| 3 | 2 5 | 06 1. 03 | 03 | | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir | 0 Dokumen 0 | Pengembanga n Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir | 1 Dokumen | 400.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan pemangku kepentingan telah disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang ada dan memenuhi beberapa indikator yang belum mencapai target. Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Berdasarkan Forum OPD terdapat beberapa usulan dari OPD Kabupaten/Kota sehingga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel .2.5.
(Tabel T-C.32 Sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|--|--|--|------------------|--|
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK | | Nilai Hilirisasi produksi garam | Rp.85.94 Milyar | |
| | | Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | 1038850.36 Ha | |
| | | Jumlah produksi garam rakyat | 99.965 ton | |
| | | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan | 23,91% | |
| Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit) | 21 Unit | |
| | | Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi (Ha) | 55 Ha | |
| Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Maros, Takalar, Pangkep | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi | 64 Ha | Penanaman Mangrove Dilengkapi dengan Proposal Desa |

| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|------------------|---|
| | Kabupaten Luwu, Wajo, Pangkajene Kepulauan, Maros dan Kota Makassar | | 0.12 Ha | Usulan Apartemen Ikan agar dilengkapi dengan proosal desa/proposal kelompok |
| | Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Takalar, Kepulauan Selayar, Maros | | 0.074 Ha | Usulan Transplantasi Karang /artificial Reef |
| | Kabupaten Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar | | 6 Unit | Usulan Pembangunan Tambatan Perahu agar dilengkapi proposal desa |
| Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | | Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan (kelompok) | | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | | |
| Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kabupaten Jenpeonto | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 Kelompok | Usulan agar dilengkapi proposal kelompok |

| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|--|---------------------|---|
| Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kabupaten Takalar | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 10 Orang | Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok |
| Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kabupaten Selayar | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 1 Kelompok | Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap | Rp. 9.210,12 Miliar | |
| | | Jumlah produksi perikanan tangkap | 413.030,8 Ton | |
| | | Cakupan bina kelompok nelayan | 30.25% | |
| | | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan | 27.17% | |
| | | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | 78,95 % | |
| Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Maros, Luwu Timur, Bone, Sinjai, Jeneponto | | | |
| Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Barru, Pangkep, Luwu, Maros, Luwu Utara, Takalar, Bone, Barru, Sinjai, Wajo, | | | |

| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|--|---|---|-------------------------------------|---|
| Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) derah Provinsi | | | | |
| Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Kabupaten Soppeng | | | |
| Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (unit) | | |
| | | Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | PPI Macini Baji Kabupaten Pangkajene Kepulauan, PPI Cempae Kota Pare Pare | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 2 Unit | Usulan fasilitas fungsional Pelabuhan agar disesuaikan dengan dokumen perencanaan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya | Rp. 15.958,39 Miliar | |
| | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 4.298.391,1 Ton | |
| | | Persentase ketersediaan benur berkualitas | 100% | |
| Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar | 150 Unit | |



| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|--|--|---|------------------|-----------------------------|
| Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kota Makassar, Pare Pare Kabupaten Maros, Takalar, Soppeng | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 18 Unit | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Takalar | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 150 Unit | |
| Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | 133 Unit | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Kabupaten Pangkep, Bone, Jeneponto, Takalar, Luwu Utara, Wajo, Luwu, Palopo, Bantaeng, Maros | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 130 Unit | Sarana Budidaya Rumput Laut |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil | | | | |

| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|--|--|---|------------------|--|
| Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil | Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 3 Dokumen | Usulan berupa sarana pengawasan bagi POKMASWAS, agar dilengkapi dengan proposal kelompok |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan | | |
| | | Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi | | |
| | | Persentase pengujian mutu produk perikanan | | |
| Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing (unit usaha) | | |
| | | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (unit usaha) | | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Kota Makassar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 Unit Usaha | Usulan agar dilengkapi proposal kelompok |

| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|----------------------------------|--|------------------|---|
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing | Kabupaten Takalar, Kota Makassar | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 5 Angkatan | Usulan Pertemuan Inovasi Produk Untuk UMKM, Pengadaan Bahan Kimia Pengujian UPT PBAPL |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah | 100 % | |
| | | Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik | 100 % | |
| | | Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP | 60% | |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kota Makassar, Kabupaten Barru | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | Usulan E Proposal Kelautan dan Perikanan dan Penyediaan Benih UPT PBAPL |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Bone, Barru | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Rehab Gedung Kantor CDK Bosowasi Rehab Kantor UPT PBAPL |

| Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kota Makassar | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota Makassar | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Usulan Roller Blind |

Usulan yang telah disampaikan pada Forum OPD untuk kabupaten/kota sebanyak 56 usulan dan Pokok-Pokok Pikiran sebanyak 231 usulan. Usulan ini akan menjadi rancangan awal Rencana Kerja tahun 2024 namun usulan tersebut masih perlu dilengkapi data dukung.

BAB III

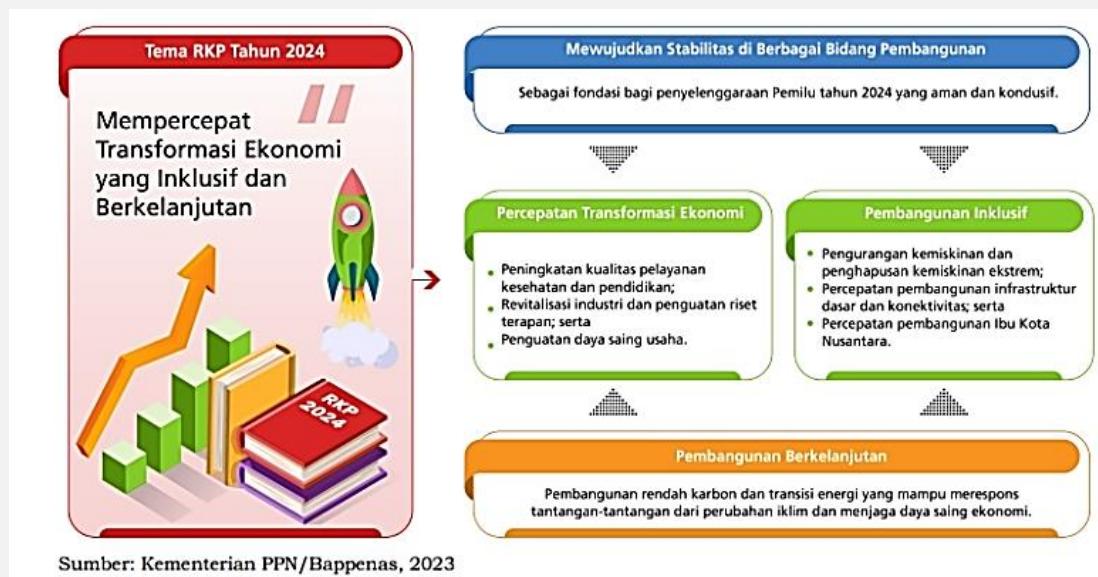
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Gambar 3.1

Kerangka Pikir Tema RKP 2024



Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini. Setiap penggambaran PN mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan sasaran capaian PN, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan PN dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP). Adapun identifikasi kebijakan nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

Tabel. 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

| No | Kebijakan Nasional | Keterangan |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan | Major Project |
| 2. | Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Pesisir | Major Project |
| 3. | Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Perbenihan Air Payau dan Tawar | Major Project |
| 4. | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP | Major Project |
| 5. | Peningkatan Daya Saing dan Mutu Produk | Major Project |
| 6. | Penurunan Stunting, Pengarustamaan Gender dan SDGs (Kemiskinan, Pelestarian dan Pemanfaatan ekosistem lautan) | Kebijakan Nasional – Internasional |
| 7. | Ekonomi Biru | Kebijakan Nasional – Internasional |

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

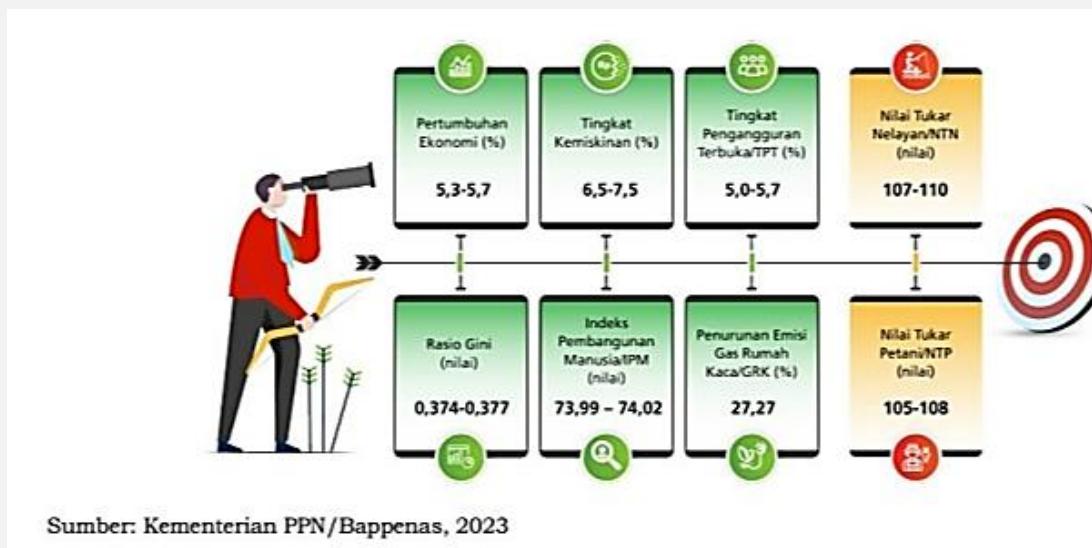
Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi**

Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan". Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024.

Gambar 3.1
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA)
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR)
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI)
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI)
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP)

Gambar 3.3
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2024, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;
6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;

11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 3.4
Keterkaitan Renja dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 (RKPD 2024)

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 | Hasil Pembahasan Rakortek |
|-----|--|--|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif | Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | Huruf/angka | 27,07 (B) | 62,27 (B) | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah | 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Huruf/angka | 68,08 (B) | 68,52 (B) | |
| 2 | Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah | Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi | % | 9,40 | 11,01 | 5,5-6,9 |
| 3 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas | Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata | Tingkat Kemiskinan | % | 8,63 | 7,30-7,89 | 7,30-7,89 |
| 4 | Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Potensi Penurunan emisi GRK (Ton CO ₂ Eq) | ton CO ₂ Eq | 7.004,89 | 7.351,3 | |

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2024 yaitu :

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2024

| NO | TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024 | PELAKSANA KINERJA |
|-----|--|--|-------------------------|--|--|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 1 | Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi OPD | Huruf/Angka | 62,27 | |
| 1.1 | Sasaran : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Huruf/Angka | 86–88 (A) | Kepala Dinas |
| a. | Program Penunjang urusan pemerintah daerah | Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah | Huruf/Angka | 99,94 | Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK |
| | | Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah | Huruf/Angka | 82,96 | |
| 2 | Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor kelautan dan perikanan | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti | % | 100 | |
| 2.1 | Sasaran : Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan | % | 11,01 | |
| a. | Program Pengelolaan Perikanan tangkap | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel Produksi Perikanan Konsumsi Ikan | % ton kg/Kap/Th | 10,5 4.779.259,3 72,48 | Kepala Dinas |
| | | Nilai Produksi Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan | Rupiah Ton % % | 11.933.561.187,2 442.595,6 29 30,62 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III) Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III) Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III) |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| NO | TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024 | PELAKSANA KINERJA |
|-----|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| b. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | % | 84,21 | Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III) |
| | | Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M) | Rp.M | 21,850.160.000 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselen III) |
| | | Jumlah Produksi perikanan budidaya (Rp.M) | Ton | 4,331.299,7 | |
| | | Persentase ketersediaan benur berkualitas (%) | % | 85 | Kepala UPT BPAPL (Eselon III) |
| c. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Produksi garam rakyat | Ton | 10.0000 | Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K (eselon III) |
| | | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan | % | 56,89 | Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K dan Kepala CDK (eselon III) |
| d. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp.M) | Rp.M | 391.94 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya, |
| | | Produksi olahan ikan (ton) | Ton | 6,150.43 | Sda |
| | | Persentase pengujian mutu produk perikanan (%) | % | 100 | Kepala UPT BPMPP (Eselon III) |
| 2.2 | Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | NTUP | Indeks | 110,84 | Kepala Dinas |
| | | NTN | Indeks | 110,46 | |
| | | NTPi | Indeks | 111,07 | |
| a. | Program Pengelolaan Perikanan tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Cakupan bina kelompok | % | 29 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Budidaya dan Daya Saing |
| | | Persentase Produksi perikanan kelompok | % | 30,62 | Kepala Bldang Perikanan Tangkap dan Bidang Budidaya dan Daya Saing |
| 3 | Tujuan : Meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan | Potensi penurunan emisi GRK dari sektor perikanan | juta ton CO ₂ | 7.172 | |

| NO | TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024 | PELAKSANA KINERJA |
|-----|--|--|------------|--------------------------------|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 3.1 | Sasaran: Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | % | 97,80 | Kepala Dinas |
| | | Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola | % | 96,40 | |
| | | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 59,56 | |
| a. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK | Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | Ha | 861,931,17 | Kepala Bidang Penataan Ruang Laut Pesisir dan P3K dan Kepala CDK (Eselon III) |
| b. | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | Unit usaha | 94,24 | Kepala Bidang Pengawasan SDKP dan Kepala CDK (Eselon III) |

Agar arah pembangunan terintegrasi dengan **Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** maka sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 hubungan tujuan dan sasaran saling mendukung dan terkait satu sama lain yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel . 3.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RENJA Dinas Tahun 2024

| No | RKPD | | Renja | |
|----|--|--|---|--|
| | Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| 1 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan | 1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan | 1.Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah | 1.1Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah |
| 2 | Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup | 2.1.Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam | 2.Meningkatkan produksi dan nilaitambah produk perikanan yang berdaya saing | 2.1.Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi 2.3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan |
| 3 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahtaan bencana | 3.1.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 2.Meningkatkan kelestariand dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan | 2.1 Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan |

Sedangkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaras dengan sasaran pembangunan jangka pendek tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
**Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan**

| No | Indikator | Target Capaian Tahun 2024 | Formulasi | Pengukuran Sumber Data |
|--|--|---------------------------|---|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| SS1.1 Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 86–88(A) | Lembar Hasil Evaluasi | Permenpan |
| SS2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | | | | |
| 1 | Produksi Perikanan (ton) | 4,779.259,3 | Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya) | BPS |
| 2 | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulsel (%) | 10,5 | (PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100% | BPS |
| 3 | Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulsel (%) | 22,55 | (Jumlah ekspor hasil perikanan (ton)/Jumlah Ekspor Daerah (ton)) x x100% | BPS |
| 4 | Konsumsi Ikan (kg/kap/th) | 72,48 | AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat | BPS |
| SS2.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) | 110,84 | (Indeks yang diterima usaha perikanan / Indeks yang dibayar usaha perikanan) x 100% | BPS |
| 2 | Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) | 111,07 | (Indeks yang diterima pembudidaya / Indeks yang dibayar pembudidaya) x 100% | |
| 3 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 110,46 | (Indeks yang diterima nelayan / Indeks yang dibayar nelayan) x 100% | |
| SS3.1 Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan | | | | |
| 1 | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%) | 97,80 | Jumlah total pelaku Usaha yang diperiksa/jumlah pelaku Usaha yang patuh/jenis usaha)x100% | DKP (data olahan) |
| 2 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) | 59,56 | (Jumlah Tangkapan Ikan 80% dari tangkapan maksimum Lestari) x100 | DKP(data olahan) |
| 3 | Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%) | 96.08 | (Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan / Total luas Kawasan perairan konservasi) x 100% | DKP(data olahan) |

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1. Program dan Kegiatan**

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2024 telah sesuai dengan RPJMD/RPD 2024-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan hal sebagai berikut

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah guna mendukung pencapaian sasaran
- b. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam mendukung :
 - Tematik Pembangunan yaitu Pengentasan kemiskinan, Penurunan stunting dan Pengendalian Inflasi,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pencapaian Pelayanan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan dan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam rangka implementasi Ekonomi Biru di Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2024, antara lain meliputi :
 - Jumlah program sebanyak 6 Program dan jumlah kegiatan sebanyak 37 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 82 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebar pada :
 - a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
 - c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;

- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar;
- h. Optimalisasi Pelayanan teknis pada Unit Pelayanan Teknis Daerah yaitu : UPT. BPMPP lokasi Kota Makassar, UPT. PBAPL lokasi Kabupaten Barru, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I lokasi Kabupaten Maros, Kabupaten, Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II lokasi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Selayar.
- i. Optimalisasi pelayanan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan pada Bidang Kelautan dan Persisir, Bidang Teknis Perikanan Tangkap, Bidang Teknis Budidaya dan Daya Saing, Bidang Teknis Pengawasan dan Sekretariat dukungan Operasional dan Manajemen.

Untuk mendukung Operasional kegiatan didukung oleh Program dengan uraian sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,**
Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
2. **Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap,**
Diarahkan pada : 1) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, 2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan dan

pengangkut dengan ukuran 10 GT di laut, sungai waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi, 3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, 4) Penerbitan tanda kapal Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 5) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, 6) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 Mil, 7) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi, 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya,

Diarahkan pada :1) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang budidaya ikan yang usahanya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) dalam Provinsi, 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, 3) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Diarahkan pada :1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, 2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

5. Program Pengolahan dan Pemasaran produk perikanan,

Diarahkan pada 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, 2) Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

6. Program Penunjang Adminsitrasи

Diarahkan dha Fokus pada Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya : 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2) Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Total kebutuhan dana/pagu tentative yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah **Rp 77.829.694.713** sesuai pagu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2024-

2026 sedangkan pagu indikatif yang dibahas oleh TPAD diperkirakan akan mengalami perubahan. Adapun rincian anggaran per program .yaitu :

| No | PROGRAM | PAGU INDIKATIF | |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | Program Pengelolaan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Rp. 9.010.000.000,- | Pengembangan Usaha Garam dan Sarpras Pndukung Produksi serta Rehabilitasi Kawasan pesisir |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp. 20.618.000.000,- | Peningkatan Pendapatan dan pemberdayaan Nelayan,penyediaan prasarana Alat Tangkap Ramah Lingkungan serta pengembangan Pelabuhan perikanan |
| 3 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. 8.068.000.000,- | Pengadaan sarana budidaya perairan darat mendorong ketahanan pangan dalam rangka penurunan stunting |
| 4 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. 1.680.000.000,- | Pengembangan Inovasi dan penerapan Standar dan Kelayakan Produk serta peningkatan kapsitas POKLASHAR |
| 5 | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Rp. 3.345.695.000,- | Pengendalian dan Menjaga kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
| 6 | Program Penunjang Adminsitrasni | Rp. 35.107.999.713,- | Gaji dan Tunjangan, Dukungan Manajemen Operasional Program Kegiatan Teknis dan Rutin |
| JUMLAH | | Rp.77.829.694.713,- | |

- d. Pada Rumusan Program Kegiatan terdapat ketidakesuaian dengan rancangan awal karena terdapat beberapa penyesuaian berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dilakukan pemetaan kembali terkait numenklatur program dan kegiatan berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja Tahun 2024 terhadap kesesuaian dengan RKPD oleh Kemendagri RI dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

TABEL TC.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan

Unit Organisasi : 3.25.00.00.38.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.00.00.38.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|------------|--|--|---|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp.) | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | 715,990,013,945.00 | | | | 830,246,665,364.00 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 77,829,694,713.00 | | | | 98,829,694,713.00 | |
| | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 77,829,694,713.00 | | | | 98,829,694,713.00 | |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah | | 99,55 Nilai | 35,107,999,713.00 | | | 99,6 Nilai | 39,287,594,713.00 | | |
| | | Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah | | 95 Nilai | | | | 97 Nilai | | | |
| | | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti | | 100 % | | | | 100 % | | | |
| 3.25.01.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. | 7 Dokumen | 1,326,500,000.00 | Pendapatan Asli Daerah | 7 Dokumen | 1,559,150,000.00 | | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|----------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| | | Pangkep, CDK Ajatapareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, | | | | | | |
| 3.25.01.1. 01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 7 Dokumen | 250,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 7 Dokumen 275,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 2 Dokumen | 12,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Dokumen 13,200,000.00 |
| 3.25.01.1. 01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 2 Dokumen | 15,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Dokumen 16,500,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 3.25.01.1. 01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 2 Dokumen | 15,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Dokumen | 16,500,000.00 |
| 3.25.01.1. 01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 2 Dokumen | 22,500,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Dokumen | 24,750,000.00 |
| 3.25.01.1. 01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 11 Laporan | 500,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 11 Laporan | 600,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 35 Laporan | 512,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 35 Laporan | 613,200,000.00 |
| 3.25.01.1. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sulawesi Selatan | 45 Laporan | 24,716,421,896.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 45 Laporan | 27,188,064,086.00 |
| 3.25.01.1. 02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 189 Orang/ Bulan | 24,608,721,896.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 207 Orang/ Bulan | 27,069,594,086.00 |
| 3.25.01.1. 02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 12 Dokumen | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Dokumen | 5,500,000.00 |
| 3.25.01.1. 02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 12 Dokumen | 2,700,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Dokumen | 2,970,000.00 |
| 3.25.01.1. 02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 Laporan | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Laporan | 5,500,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|----------------|
| 3.25.01.1. 02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | 2 Dokumen | 27,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Dokumen | 29,700,000.00 |
| 3.25.01.1. 02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | 18 Laporan | 65,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 18 Laporan | 71,500,000.00 |
| 3.25.01.1. 02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 1 Dokumen | 3,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 3,300,000.00 |
| 3.25.01.1. 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah | | 53 Unit | 49,600,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 53 Unit | 127,200,000.00 |
| 3.25.01.1. 03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | 1 Dokumen | 2,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 2,200,000.00 |
| 3.25.01.1. 03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | 1 Dokumen | 40,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 95,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | 1 Laporan | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Laporan | 25,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 2 Laporan | 2,600,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Laporan | 5,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah | Sulawesi Selatan | 1.938.413.662 Rp | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1.986.874.004 Rp | 30,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 04.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | | 1 Dokumen | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 30,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sulawesi Selatan | 6 Laporan | 293,390,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 7 Laporan | 373,336,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------|----------------|-------------------------|--|------------|----------------|
| 3.25.01.1. 05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | 1 Unit | 18,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Unit | 50,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | 189 Paket | 176,860,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 207 Paket | 185,703,000.00 |
| 3.25.01.1. 05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | 12 Dokumen | 4,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Dokumen | 4,400,000.00 |
| 3.25.01.1. 05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | 12 Dokumen | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Dokumen | 5,250,000.00 |
| 3.25.01.1. 05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | 12 Dokumen | 44,530,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Dokumen | 48,983,000.00 |
| 3.25.01.1. 05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | 50 Orang | 45,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 60 Orang | 54,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | - | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 6 Orang | 25,000,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|---|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 3.25.01.1. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum | (SULAWESI SELATAN), (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatapareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, UPT Pelabuhan 1 Kab. Bone, UPT Pelabuhan 2 Kab. Bulukumba, UPT BPMPP Kota Makassar, UPT PBAPL Kab. Barru, Sekretariat Dinas KP Kota Makassar, | 100 Unit | 1,481,755,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 120 Unit | 1,788,015,500.00 |
| | | Jumlah Tamu Yang difasilitasi | | 2.145 Orang | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | 2.574 Orang | 0.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|------------------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| 3.25.01.1. 06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 12 Paket | 23,905,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Paket | 26,295,500.00 |
| 3.25.01.1. 06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 30 Paket | 645,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 30 Paket | 774,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | 28 Paket | 72,100,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 32 Paket | 100,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 30 Paket | 81,200,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 30 Paket | 89,320,000.00 |
| 3.25.01.1. 06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 12 Laporan | 117,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Laporan | 140,400,000.00 |
| 3.25.01.1. 06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 Laporan | 540,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Laporan | 648,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | 1 Dokumen | 2,550,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 10,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | | 8 Unit | 91,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 10 Unit | 300,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | 7 Paket | 41,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 17 Paket | 100,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | 1 Unit | 50,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Unit | 200,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 163 Laporan | 4,670,460,373.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 163 Laporan | 4,856,829,127.00 |
| 3.25.01.1. 08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 860,064,729.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Laporan | 1,020,433,483.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 3.25.01.1. 08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 12 Laporan | 100,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Laporan | 126,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 139 Laporan | 3,710,395,644.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 139 Laporan | 3,710,395,644.00 |
| 3.25.01.1. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | 30 Unit | 2,453,872,444.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 36 Unit | 3,065,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | 17 Unit | 1,500,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 17 Unit | 1,650,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 12 Unit | 103,872,444.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 14 Unit | 115,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | 1 Unit | 50,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Unit | 100,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 4 Unit | 800,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 5 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 3.25.01.1. 09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | - | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 5 Unit | 200,000,000.00 |
| 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | | 816,593,22 Ha | 9,010,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 822.559,69 Ha | 10,916,000,000.00 |
| | | Jumlah produksi garam rakyat | | 5.000 Ton | | Pendapat an Asli Daerah | | 6.000 Ton | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan | | 56,89 % | | Pendapat an Asli Daerah | | 78,44 % | |
|-----------------|---|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|
| 3.25.02.1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Luas kawasan konservasi yang direhabilitasi | Sulawesi Selatan | 61 Ha | 8,145,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 70 Ha | 9,774,250,000.00 |
| | | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi | | 14 Unit | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 14 Unit | 0.00 |
| 3.25.02.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K | | 74 Dokumen | 1,755,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 74 Dokumen | 1,850,000,000.00 |
| 3.25.02.1.01.02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | | 247.323,69 Ha | 1,500,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 5.966,43 Ha | 1,800,000,000.00 |
| 3.25.02.1.01.03 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi | | 61 Ha | 4,890,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 70 Ha | 6,124,250,000.00 |
| 3.25.02.1.02 | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan | | 12 Rekomendasi | 15,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Rekomendasi | 16,750,000.00 |
| 3.25.02.1.02.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | 4 Rekomendasi | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 4 Rekomendasi | 5,500,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 3.25.02.1. 02.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | | 4 Rekomendasi | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 4 Rekomendasi | 5,500,000.00 |
| 3.25.02.1. 02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan | | 4 Rekomendasi | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 4 Rekomendasi | 5,750,000.00 |
| 3.25.02.1. 03 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan | CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatapareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, | 300 Orang | 850,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | | 315 Orang | 1,125,000,000.00 |
| 3.25.02.1. 03.01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | 100 Orang | 300,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | | 105 Orang | 500,000,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|--|---|-------------------|----------------|
| 3.25.02.1. 03.02 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | 10 Kelompok | 500,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 10 Kelompok | 525,000,000.00 |
| 3.25.02.1. 03.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | 10 Kelompok | 50,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 20 Kelompok | 100,000,000.00 |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Nilai Produksi Perikanan Tangkap | | 11.933.56 0.000 Rp | 20,618,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 11.960.232.411 Rp 451.818,7 Ton 30 % 31,23 % 89,47 % | 30,600,600,000.00 | |
| | | Jumlah produksi perikanan tangkap | | 442.959,6 Ton | | | | | |
| | | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | | 29 % | | | | | |
| | | Percentase Produksi perikanan kelompok nelayan | | 30,62 % | | | | | |
| | | Percentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | | 84,21 % | | | | | |
| 3.25.03.1. 01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 215 Unit | 5,100,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 437 Unit | 11,100,000,000.00 | |
| | | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah | | 99 Kelompok | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | 114 Kelompok | 0.00 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|------------|------------------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| 3.25.03.1. 01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 7 Unit | 1,000,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 20 Unit | 5,000,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Sinjai, Bulukumba, Takalar, Jeneponto, Bone, Wajo, Barru, Pangkep, Maros, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo | 200 Unit | 4,000,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 400 Unit | 6,000,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 02 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | | 50 Unit | 1,600,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 75 Unit | 1,760,000,000.00 |
| | | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah | | 6 Kelompok | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 10 Kelompok | 0.00 |
| 3.25.03.1. 02.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 110,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 02.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | | 4 Unit | 800,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 5 Unit | 850,000,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------|----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 3.25.03.1. 02.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | | 46 Unit | 700,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 70 Unit | 800,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 03 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | 13 Rekomendasi | 39,344,044.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 15 Rekomendasi | 66,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 03.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | | 13 Rekomendasi | 14,344,044.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 15 Rekomendasi | 16,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 03.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | | 1 Dokumen | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 04 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan | | - | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 10 Rekomendasi | 10,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 04.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | | - | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 10 Rekomendasi | 10,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 05 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas | Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan | | 126 Dokumen | 10,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 144 Dokumen | 15,000,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.25.03.1. 05.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 05.02 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan | | 125 Dokumen | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 143 Dokumen | 10,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 06 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | 6 Pelabuhan | 13,818,655,956.00 | Pendapat an Asli Daerah DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 7 Pelabuhan | 17,554,600,000.00 |
| | | Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola | | 19 Pelabuhan | 0.00 | | 19 Pelabuhan | 0.00 |
| 3.25.03.1. 06.01 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | | 6 Pelabuhan Perikanan | 223,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 7 Pelabuhan Perikanan | 256,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 06.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | | 6 Unit | 13,460,655,956.00 | Pendapat an Asli Daerah, DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 7 Unit | 17,148,600,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 3.25.03.1. 06.03 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | | 19 Layanan | 135,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 19 Layanan | 150,000,000.00 |
| 3.25.03.1. 07 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT | | - | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | 1.020 Rekomendasi | 20,000,000.00 | |
| 3.25.03.1. 07.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | - | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | |
| 3.25.03.1. 07.02 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan | | - | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | 1.020 Rekomendasi | 10,000,000.00 | |
| 3.25.03.1. 08 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut Ikan dgn Ukuran Sampai dgn 10 GT di Laut,Sungai,Danau,Waduk,Raw a, dan Genangan air lainnya yang dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins | | 4 Rekomendasi | 10,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 6 Rekomendasi | 20,000,000.00 | |
| 3.25.03.1. 08.02 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | 4 Rekomendasi | 10,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 6 Rekomendasi | 20,000,000.00 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 3.25.03.1.09 | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT | | 11 Laporan | 15,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Laporan | 27,500,000.00 |
| 3.25.03.1.09.02 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | | 11 Rekomendasi | 15,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Rekomendasi | 27,500,000.00 |
| 3.25.03.1.10 | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk ,Rawa ,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 61 Laporan | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 64 Laporan | 27,500,000.00 |
| 3.25.03.1.10.02 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | | 61 Rekomendasi | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 64 Rekomendasi | 27,500,000.00 |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Nilai produksi perikanan budidaya | Sulawesi Selatan | 21.850.160.000 Rp | 8,068,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, | | 22.187.160.000 Rp | 11,389,500,000.00 |
| | | Jumlah Produksi perikanan budidaya | | 4.331.299,7 Ton | | | | 4.417.925,7 Ton | 0.00 |
| | | Persentase ketersediaan benur berkualitas | | 85 % | | | | 90 % | 0.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 3.25.04.1. 01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | | 10 Rekomendasi | 50,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 10 Rekomendasi | 53,500,000.00 |
| 3.25.04.1. 01.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | | 5 Rekomendasi | 5,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 5 Rekomendasi | 5,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 01.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | | 5 Rekomendasi | 10,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 5 Rekomendasi | 10,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | | 1 Dokumen | 35,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 38,500,000.00 |
| 3.25.04.1. 02 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing | | 100 Rekomendasi | 20,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 102 Rekomendasi | 22,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 02.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | | 100 Rekomendasi | 20,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 102 Rekomendasi | 22,000,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 3.25.04.1. 03 | Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan | | 2 Rekomendasi | 20,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 4 Rekomendasi | 22,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 03.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | | 2 Rekomendasi | 20,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 4 Rekomendasi | 22,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 04 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi | | 10 Laporan | 20,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 12 Laporan | 22,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 04.02 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 10 Rekomendasi | 20,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 12 Rekomendasi | 22,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 05 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | 601 Unit | 3,508,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | 729 Unit | 4,270,000,000.00 |
| | | Jumlah pembudidaya di kawasan konservasi dan laut yang dibina dan dipantau | | 40 Orang | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | 50 Orang | 0.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|
| 3.25.04.1. 05.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | 1 Dokumen | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 05.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | 600 Unit | 3,200,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 728 Unit | 3,840,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 05.04 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | 1 Unit | 200,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Unit | 220,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 05.06 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat | | 10 Dokumen | 43,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 12 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 05.07 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya | | 40 Orang | 40,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 60 Orang | 60,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 06 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan | | 1.150 Hektar | 4,450,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, | | 1.150 Hektar | 7,000,000,000.00 |
| | | Jumlah produksi nener / benur yang berkualitas | | 18.700.000 Ekor | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 19.800.000 Ekor | 0.00 |
| | | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat | | 185 Unit | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 187 Unit | 0.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-------------|------------------|--|--|-------------|------------------|
| 3.25.04.1. 06.01 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | 35 Unit | 3,000,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi KhususFisik, | | 37 Unit | 3,600,000,000.00 |
| 3.25.04.1. 06.02 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | 100 Unit | 1,450,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, | | 200 Unit | 3,400,000,000.00 |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | 100 % | 3,819,260,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | | 100 % | 3,821,000,000.00 |
| 3.25.05.1. 01 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil | | 9 Dokumen | 3,724,260,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 9 Dokumen | 3,671,000,000.00 |
| | | Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) | | 13 Kelompok | | Pendapat an Asli Daerah | | 13 Kelompok | 0.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|----------------|------------------|--|--|-------------|------------------|
| 3.25.05.1. 01.01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | 1 Dokumen | 60,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 66,000,000.00 |
| 3.25.05.1. 01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | (CDK Mamminasata Kab Gowa, CDK Pangkajene Kepulauan Kab. Pangkep, CDK Ajatapareng Kota Pare Pare, CDK Wilayah Selatan Kab Bulukumba, CDK Bosowasi Kab Bone, CDK Selayar Kab Kepulauan Selayar, CDK Luwu Raya Kota Palopo, SULAWESI SELATAN) | 7 Dokumen | 3,549,260,000.00 | Pendapat an Asli Daerah, DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | | 7 Dokumen | 3,425,000,000.00 |
| 3.25.05.1. 01.03 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | 1 Dokumen | 45,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 80,000,000.00 |
| 3.25.05.1. 01.04 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif | | 13 Kelompok | 70,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 13 Kelompok | 100,000,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|---------------|------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|
| 3.25.05.1.02 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 8 Dokumen | 90,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 8 Dokumen | 150,000,000.00 |
| 3.25.05.1.02.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | | 1 Dokumen | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 3.25.05.1.02.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | | 3 Dokumen | 30,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 3 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 3.25.05.1.02.03 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 4 Dokumen | 35,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 4 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan | Sulawesi Selatan | 391.940.00 Rp | 1,680,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 411.540.000 Rp | 2,815,000,000.00 |
| | | Produksi olahan ikan | | 6.150,43 Ton | 0.00 | | | 6.273,44 Ton | 0.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | Persentase pengujian mutu produk perikanan | | 100 % | 0.00 | | | 100 % | 0.00 |
|-----------------|--|---|--|----------------|------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|
| 3.25.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan | | 85 Rekomendasi | 50,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 85 Rekomendasi | 55,000,000.00 |
| 3.25.06.1.01.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 85 Rekomendasi | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 85 Rekomendasi | 27,500,000.00 |
| 3.25.06.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | | 1 Dokumen | 25,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 27,500,000.00 |
| 3.25.06.1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdaya saing | | 70 Unit Usaha | 1,500,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 70 Unit Usaha | 2,550,000,000.00 |
| | | Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | | 100 Unit Usaha | 0.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 100 Unit Usaha | 0.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------|------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|
| 3.25.06.1. 02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | | 70 Unit Usaha | 500,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 70 Unit Usaha | 550,000,000.00 |
| 3.25.06.1. 02.02 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | 115 Unit Usaha | 1,000,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 117 Unit Usaha | 2,000,000,000.00 |
| 3.25.06.1. 03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan | | 2 Laporan | 130,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 2 Laporan | 210,000,000.00 |
| 3.25.06.1. 03.01 | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 1 Dokumen | 30,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|----------------|
| 3.25.06.1. 03.03 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | Pendapat an Asli Daerah | | 1 Dokumen | 110,000,000.00 |
|---------------------|---|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|----------------|

Berdasarkan tabel diatas maka diuraikan sasaran strategis tahun 2024 yang akan didukung yaitu:

Sasaran :

1. **Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi**
2. **Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**
3. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga, swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah

Didukung oleh program :

Program Prioritas :

1. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Indikator Program :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2024 sebesar | Rp. 11.933.560 |
| M | |
| b. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2024 sebesar 442.959.60 ton | |
| c. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2024 sebesar 84.21 % | |
| d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2024 sebesar 29.00 % | |
| e. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2024 sebesar 30.62 % | |

Program ini meliputi kegiatan :

- a. Pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
 1. Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai 30 GT.
- b. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusuhakan lintas kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 1. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT.
- c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

1. Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
- d. Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diuruskan lintas kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 1. Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
- e. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
 - a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- f. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 Mil
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
 - b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
 - c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- g. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
 - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- h. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Berdasarkan aspek kajian pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil berbasis Teknologi penangkapan ikan (fishing technology) yang diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan meliputi:
 - a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
 - b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara

- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.
- d) Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Ikan
- e) Pelayanan rekomendasi usaha Perikanan tangkap dalam rangka perijinan dan kemudahan akses nelayan dalam melakukan usaha Perikanan tangkap di luar wilayah penangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan.
- f) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama yang berbasis antar pemerintah, institusi, lembaga dan swasta dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- g) Revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dalam mendukung *Penangkapan Ikan Terukur dan Konservasi habitat dan sumberdaya ikan* kemudian Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan hygienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

2. Program Perikanan Budidaya :

Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2024 Rp. Rp. 21.850,16 M
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2024 sebesar 4.331.299,7 ton
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 100% per tahun

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yaitu udang windu dan rumput laut serta komoditas ikan lainnya dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi

selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program ini meliputi kegiatan :

- a. Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidaya ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 1. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan.
 2. Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang budidaya ikan
- b. Pengelolaan pembudidaya ikan di laut
 1. Penyediaan prasarana pembudidaya ikan di laut
 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 4. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat
 1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan ini adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD/RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yaitu Pengembangan **rumput laut** dan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan dan berkelanjutan sampai tahun 2024. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Adapun produksi komoditas unggulan perikanan budidaya rencana tahun 2024 sampai dengan tahun 2024.

Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar didaerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pengembangan kampung pembudidaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, kampung ini diharapkan dapat memulihkan Ekonomi masyarakat dengan Corporate Farming dengan membangun Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut seperti *Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, Kerapu, Rumput Laut, dll.*

Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng dan komoditas ikan lainnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan subkegiatan lebih diarahkan pada:

- a. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu penanganan pasca panen di 19 kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.
- c. Pengembangan budidaya air tawar sesuai kewenangan provinsi dan pemeliharaan sarpras instalasi Balai Benih Ikan Provinsi dalam rangka peningkatan produksi benih komoditas ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pemulihran ekonomi dan penurunan stunting.
- d. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi, pemulihran ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global dan ketersediaan pangan ikan dari perikanan budidaya untuk penanganan stunting.
- e. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- f. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.
- g. Penyediaan prasarana produksi budidaya air tawar dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan.

3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program

- a. Produksi garam rakyat tahun 2024 sebesar 5.000 ton
- b. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2024 sebesar 56.89 %

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya **pesisir dan pulau-pulau kecil** yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut.

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

3. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini diarahkan pada pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5

kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep , Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berdaya saing.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Indikator Program :

- a. **Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2024 sebesar Rp. 391.94 Miliar**
- b. **Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2024 sebesar 6.150,43 ton**
- c. **Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2024 sebesar 100%**

Tahun 2024 akan dilakukan upaya untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat dan menghasilkan produk yang berdaya saing yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan. Adapun dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
2. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihhan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Program :

Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2024 sebesar 89,85%

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk sistem pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- c. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil

- d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
 - b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
 - c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.
2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan dengan melibatkan kaum muda yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan disetiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program :

- a. Nilai rata-rata capaian indicator kinerja program perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan LHP yang selesai ditindaklanjuti

Pada program

ini akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Aset Tak Berwujud

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Pengadaan asset yang tidak berwujud

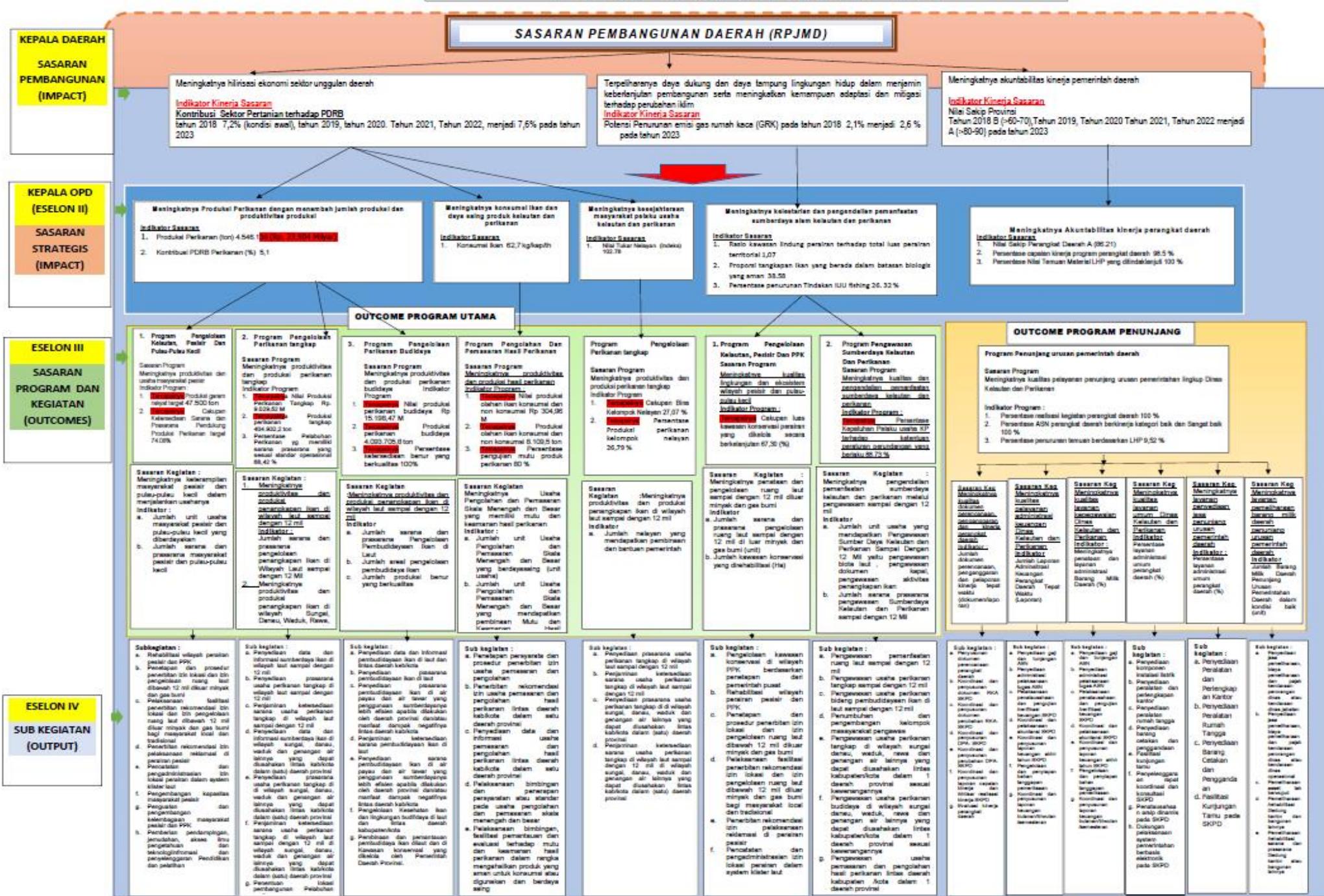
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berikut pohon Kinerja untuk tahun 2024 seperti pada gambar dibawah ini

POHON KINERJA



BAB V
PENUTUP

1.1. Catatan Penting

Berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi terdapat beberapa usulan program prioritas untuk masyarakat yang diakomodir dan diharapkan kabupaten/kota dan aspirasi pokok-pokok pikiran dapat memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan hibah yang berlaku. Selain itu kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kegiatan yang mengarah pada tematik penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perbaikan/ restorasi kawasan mangrove dalam rangka penataan dan perbaikan lingkungan pesisir. Dalam pelaksanaannya ke depan maka perlu kesiapan dan dukungan anggaran serta secara teknis agar kabupaten/kota dapat membantu masyarakatnya untuk memenuhi persyaratan proposal dan integritas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut. Namun seandainya anggaran yang ada tidak tersedia maka alternatif yang ditempuh adalah dengan memilih kegiatan yang lebih prioritas sesuai kebijakan pemerintah daerah.

1.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan di **tahun 2024**. Renja ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan **tahun 2024**. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Tahun 2024 - 2026.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan Rencana dan Tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan (*Proving*) kinerja dan untuk memperbaiki (*Improving*) kinerja. Adapun kendala yang masih dihadapi adalah :

a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;

b. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;

c. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (*talent pool*) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi

pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

d. Inefisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan 2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan;

e. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan

Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya Masyarakat yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perikanan di Sulawesi Selatan sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta perikanan, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024.

Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun diluar pemerintahan.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat mendukung sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Dokumen Rencana Kerja OPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KERJA TAHUN 2024



Tahun 2024 oleh masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.

Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun perikanan di Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal Penghasil devisa, Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.

CASCADING ESELON II DAN ESELON III TAHUN 2024

| NO | TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024 | PELAKSANA KINERJA | FORMULASI |
|-----|--|--|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| 1 | Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi OPD | Huruf/Angka | 62,27 | | |
| 1.1 | Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Huruf/Angka | 86 – 88 (A) | Kepala Dinas | Lembar Hasil Evaluasi |
| a. | Program Penunjang urusan pemerintah daerah | Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah | Huruf/Angka | 99,55 | Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK | |
| | | Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah | Huruf/Angka | 95 | Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK | |
| | | Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti | % | 100 | Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK | |
| 2 | Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor kelautan dan perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan | % | 11,01 | | |
| 2.1 | Sasaran : Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB | % | 10,5 | Kepala Dinas | (PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100 % |
| | | Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor SULsel | % | 22,6 | Kepala Dinas | (Nilai ekspor hasil perikanan (ton)/Nilai Ekspor Daerah (ton)) x100% |
| | | Produksi Perikanan | ton | 4.779.259,3 | Kepala Dinas | Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya) |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------|-------------------|--|---|
| | | Konsumsi Ikan | kg/Kap/Th | 72,48 | Kepala Dinas | AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat |
| a. | Program Pengelolaan Perikanan tangkap | Nilai Produksi Perikanan Tangkap | Rupiah | 11933561187 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III) | |
| | | Jumlah produksi perikanan tangkap | ton | 442.959,6 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III) | |
| | | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | % | 73,68 | Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III) | |
| b. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Nilai produksi perikanan budidaya | Rp.M | 21,819,765,780,70 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III) | |
| | | Produksi perikanan budidaya | Ton | 4,246,372,30 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III) | |
| | | Persentase ketersediaan benur berkualitas | % | 80 | Kepala UPT BPAPL (Eselon III) | |
| c. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Produksi garam rakyat | Ton | 10,000 | Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K (eselon III) | |
| | | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan | % | 18 | Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir dan Kepala CDK (eselon III) | |
| | | - Sarpras Garam | % | 11.61 | Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir (eselon III) | |
| | | - Sarpras Pesisir (tambatan perahu) | % | 6.45 | Kepala CDK (eselon III) | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|----------|--|---|
| d. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp.M) | Rp.M | 373.28 | Kepala Bidang Budidaya dan Daya Saing (eselon III) | |
| | | Produksi olahan ikan (ton) | Ton | 6,029.83 | Kepala Bidang Budidaya dan Daya Saing (eselon III) | |
| | | Percentase pengujian mutu produk perikanan (%) | % | 100 | Kepala UPT BPMPP (Eselon III) | |
| 2.2 | Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan | NTUP | Indeks | 109,33 | Kepala Dinas | (Indeks yang diterima pelaku usaha perikanan/Indeks yang dibayar pelaku usaha perikanan) x 100% |
| | | NTN | Indeks | 110,46 | Kepala Dinas | (Indeks yang diterima nelayan/Indeks yang dibayar nelayan) x 100% |
| | | NTPi | Indeks | 111,07 | Kepala Dinas | (Indeks yang diterima pembudidaya /Indeks yang dibayar pembudidaya) x 100% |
| a. | Program Pengelolaan Perikanan tangkap | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | % | 29 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III) | |
| b. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Produksi perikanan kelompok | % | 30.62 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya(Eselon III) | |

| NO | TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021 | PELAKSANA KINERJA | FORMULASI |
|----|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------|
|----|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----------|

RENCANA KERJA TAHUN 2024



| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
|-----|---|--|--------------------------|------------|---|---|
| 3 | Tujuan: Meningkatkan kelestarian dan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan | Kontribusi penurunan emisi GRK dari sektor perikanan | juta ton CO ₂ | 7.351,3 | | |
| 3.1 | Sasaran: Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | % | 95,89 | Kepala Dinas | (Jumlah usaha perikanan, kapal yang patuh dan pemanfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan/ Target Daerah)x 100% |
| | | Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola | % | 96,08 | | (Luas Kawasan konservasi Perairan yang dikelola/ Total Target Luas Kawasan Konservasi Perairan) x 100% |
| | | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 47,56 | | Jumlah Tangkapan Ikan / 80% dari tangkapan maksimum Lestari) x100 |
| a. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK | Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | Ha | 861,931,17 | Kepala Bidang Penataan Ruang Laut Pesisir dan P3K dan Kepala CDK (Eselon III) | |
| | | Luas Kawasan konservasi yang ditetapkan | Ha | 861,894,17 | Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir(Eselon III) | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | |
|----|--|--|------------|-------|---|--|
| | | Rehabilitasi Kawasan Mangrove | Ha | 37.00 | Kepala Kepala CDK (Eselon III) | |
| b. | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | % | 89,85 | Kepala Bidang Pengawasan SDKP dan Kepala CDK (Eselon III) | |
| | | Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pemanfaatan ruang laut 12 mil | Unit usaha | 15 | Kepala Bidang Pengawasan SDKP (Eselon III) | |
| | | Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan budidaya | Unit usaha | | Kepala Bidang Pengawasan SDKP (Eselon III) | |
| | | Pengawasan sumberdaya pengolahan | Unit usaha | | Kepala Bidang Pengawasan SDKP (Eselon III) | |
| | | Pengawasan sumberdaya perikanan tangkap | Unit usaha | | Kepala CDK (Eselon III) | |